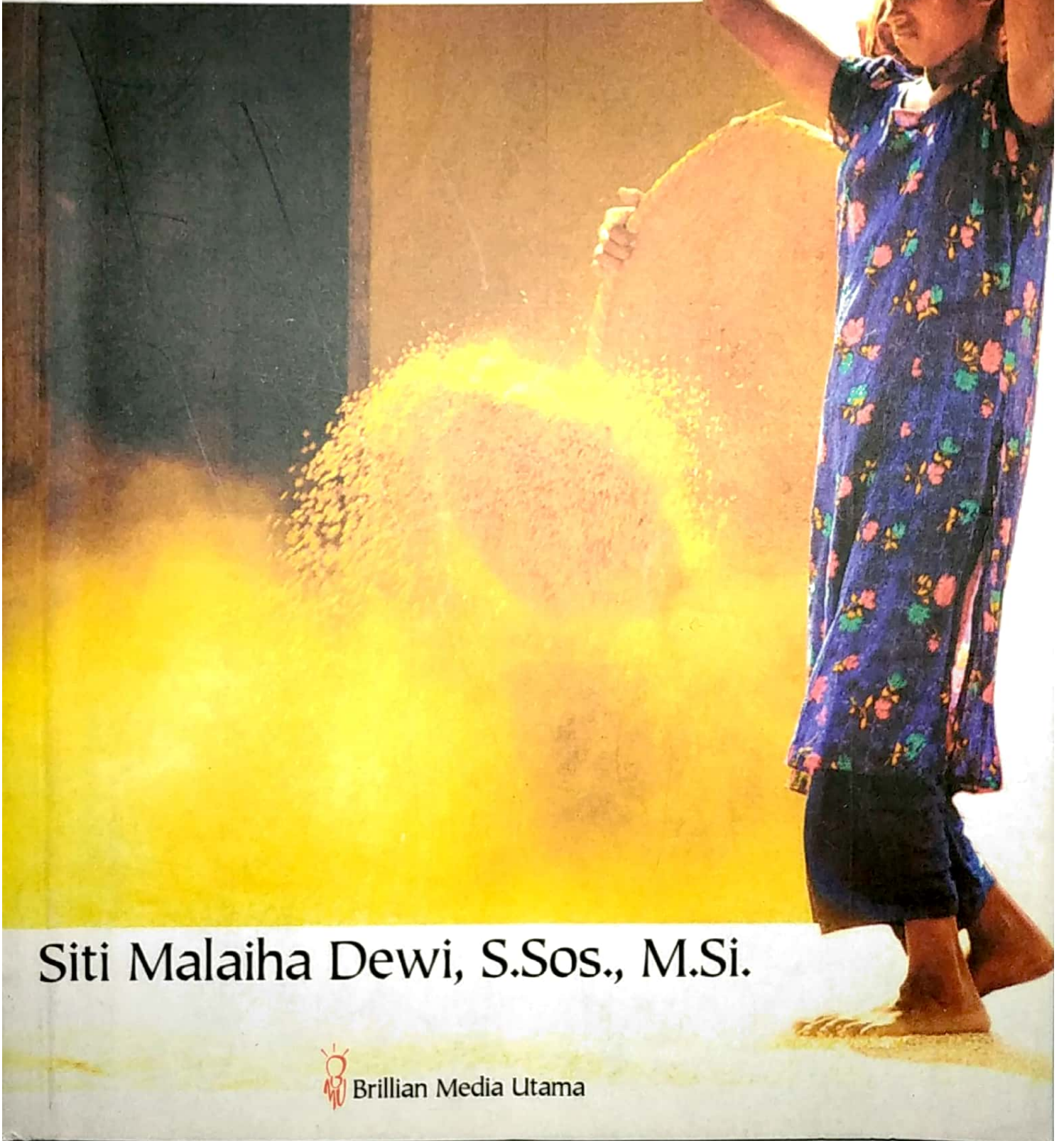


ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN MARGINAL



Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si.



Brilliant Media Utama

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN MARGINAL

Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si.



Brillian Media Utama

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN MARGINAL

© Siti Malaiha Dewi, 2009

Penyunting Naskah: Nur Said
Desain Sampul: Tim Brillian

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Diterbitkan oleh:
CV. Brillian Media Utama
Jl. Raya Kudus – Pati Km. 7
Tenggeles No. 341 Kudus 59381
Telp./Faks. 0291-435936
Email: brillian_media@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Siti Malaiha Dewi

Orientasi Politik Perempuan Marginal/karya Siti Malaiha Dewi;
penyunting, Nur Said- Kudus: Brillian Media Utama, 2009.

----- xxii+126 hal : 14 x 20 Cm

ISBN: 978-979-16440-3-7

Didistribusikan oleh:

CV. Brillian Media Utama

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 7 Tenggeles No. 341 Kudus 59381
Telp./Faks. 0291-435936 Email: brillian_media@yahoo.co.id

Perwakilan Jakarta:

Jl. Kayu Manis Condet, Balekambang HP. (Rozak) 0817751301 Jakarta.

Perwakilan Bandung:

Jl. Gerlong Girang No. 156 Telp./Faks. 022-2021213 Bandung

Perwakilan Yogyakarta:

Jl. Ace Gaten, Condong Catur HP. (Eris) 085739192121 Sleman, Yogyakarta.

PENGANTAR PENERBIT

Eksistensi sebuah masyarakat yang mewujud dalam pranata sosial tak lepas dari struktur sosial dalam interaksinya dengan sistem sosial yang lain. Karena itu proses demokrasi sebagai sistem ideal yang sedang diperjuangkan oleh sebuah bangsa yang menekankan semangat '*government of the people, by the people and for the people*' akan terbangun manakala partisipasi rakyat kuat tanpa memandang dimensi gender sebagai laki-laki atau perempuan. Bagaimana upaya demokratisasi harus diawali dan dikembangkan?

Sunyoto Usman (2004) memberikan tawaran menarik bahwa demokratisasi dalam kehidupan masyarakat lazimnya diawali dengan mempertanyakan kembali persoalan interaksi antara negara dan masyarakat sipil. Dengan asumsi, ketika masyarakat sipil kuat, maka proses demokratisasi sesungguhnya berjalan lebih cepat. Dan sebaliknya ketika masyarakat sipil semakin lemah maka demokratisasi mengalami kemunduran.

Sementara polemik tentang masyarakat sipil juga tak lepas dari upaya menegakkan hak-hak sipil (*the civil rights*), termasuk hak-hak perempuan sehingga negara menjadi tidak adikuasa. Nilai penting yang melekat dari masyarakat sipil adalah partisipasi politik dimana masyarakat baik laki-laki maupun perempuan turut mewarnai keputusan publik. Namun sudahkah

perempuan sebagai bagian imperatif dari masyarakat sipil turut terlibat dalam momentum demokrasi seperti pemilu presiden yang belum lama ini diselenggarakan?. Sebuah pertanyaan yang masih sulit menemukan jawabannya.

Kalau sekarang kebijakan politik quota 30 % sedang diperkuat realisasinya di tengah pencatutan "politik perempuan" tingkat elite. Namun kebijakan politik apa yang berpihak bagi perempuan-perempuan marginal, seperti *simbok bakul* sayur di pasar, perempuan pengemis di jalanan, ibu-ibu guru madrasah di kampung, perempuan adat di komunitas samin dan seterusnya? Nyaris mereka bak pepatah "*habis manis sepah dibuang*". Paska pemilu mereka terpaksa kesepian dan terasing dari gemerlap dan empuknya kursi politik. Harapan mereka sebenarnya sederhana sebagaimana tercermin oleh seorang pedagang sayur berikut:

"... Saya menyoblos dengan harapan ada perbaikan ekonomi. Agar kebutuhan sehari-hari saya terpenuhi..."

(Perempuan Pedagang Sayur)

Namun sudahkah harapan tersebut terpenuhi? Sejuahmana antusiasme para perempuan marginal tersebut di tengah politik yang semakin keras? Dan bagaimana partisipasi politik mereka dalam pemilu preseiden 2009? Para "srikandi-srikandi" yang terpaksa terpinggirkan tersebut adalah bagian dari masyarakat sipil yang memiliki harkat dan martabat. Memperjuangkan harkat, berarti peduli atas aspek-aspek kebutuhan mereka, sementara peduli martabatnya

berarti memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat sipil dengan penuh totalitas.

Buku *Orientasi Politik Perempuan Marginal* menjadi menarik karena berusaha menjamah sisi ruang politik yang masih langka dijamah oleh para peneliti. Gema politik perempuan di tingkat elite, mungkin sudah banyak menjadi bahan kajian. Namun fenomena politik perempuan marginal adalah ruang *habitus* yang masih terasing dari wacana politik di negeri ini. Hal ini tak lepas dari pendidikan politik yang masih elitis, sehingga identitas politik perempuan-perempuan marginal tersebut masih belum menemukan bentuknya yang jelas. Kalau Kuntowijoyo pernah mencoba mengelaborasi "Identitas Politik Islam" (1997), maka buku ini tampaknya mengawali upaya menemukan "Identitas Politik Perempuan Marginal". Karena itu, buku ini menjadi penting bagi siapa saja yang tertarik pada dunia politik, baik mahasiswa, akademisi ataupun para politisi. Lebih khusus lagi sangat cocok bagi mereka yang komitmen memperjuangkan hak-hak perempuan agar perjuangan yang ada didasarkan pada data dan fakta sehingga lebih membumi.

Sebagai penerbit, kami bangga dipercaya untuk menerbitkannya meski dalam jangka waktu yang serba singkat di tengah bulan yang suci ini. Kami berharap, buku ini mampu memberikan inspirasi bagi pembaca dan mampu membuka selubung tradisi politik perempuan marginal yang selama ini masih menjadi misteri.

SELAMAT MEMBACA.

KATA PENGANTAR

Siti Musdah Mulia

Ahli Peneliti Utama dan Aktivistis Perempuan
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Buku berjudul *Orientasi Politik Perempuan Marginal* cukup inspiratif. Buah karya Siti Malaiha Dewi, seorang perempuan aktivis, masih muda dan berbakat. Analisis tajam penulis membuka mata kita tentang banyak hal yang selama ini tak terpikirkan terkait isu perempuan dan politik. Berbeda dengan banyak buku lain yang membidik isu serupa, buku ini menyuguhkan pengalaman politik kaum perempuan marginal apa adanya di lapangan.

Hasil wawancara dengan kelompok perempuan pinggiran: tukang parkir, pedagang kecil, buruh rokok, dalang, tukang batu bata, pengemis dan kaum papa lainnya memberikan nuansa tersendiri yang menjadikan buku ini enak dibaca dan mencerahkan. Kekuatan buku ini justru terletak pada kemampuan penulis mengungkapkan pergulatan politis kaum perempuan di dunia nyata, bukan hanya dalam wacana.

Bicara soal politik dan perempuan, saya lalu teringat pengalaman sebagai koordinator program

pendidikan pemilih (*voter education*) bagi perempuan di tingkat *grass root*. Sedikitnya, ada tiga hal dapat disimpulkan dari program tersebut. *Pertama*, meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari setengah abad, namun perempuan pada umumnya belum memahami hak-hak asasi mereka, khususnya hak politik dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak tersebut. *Kedua*, umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi Pemilu sebagai sarana membangun Indonesia yang demokratis, serta kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. *Ketiga*, pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan sistemik. Karena itu, banyak perempuan buta politik dan bersikap apatis terhadap aktivitas politik.

Pengalaman riil dalam *voter education* itu menyimpulkan bahwa masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam tiga isu. *Pertama*, keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. *Kedua*, Komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan. *Ketiga*, kendala struktural, nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki.

Fakta di lapangan mengungkapkan, struktur politik negara selama ini menegasikan hak politik

perempuan sedemikian rupa, baik secara individual maupun kolektif. Akibatnya, perempuan mengalami proses depolitisasi yang luar biasa. Depolitisasi perempuan digambarkan secara apik oleh penulis dan itu merupakan rekaman hasil wawancara penulis terhadap para perempuan di lapangan.

Politik pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan mengelola kekuasaan dan kehandalan mengambil keputusan. Keduanya merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Mulai dari institusi yang paling kecil di lingkungan keluarga sampai ke institusi politik formal tertinggi dalam betuk kehidupan bernegara. Setiap saat manusia: laki-laki dan perempuan dihadapkan pada relasi kuasa dan keharusan mengambil keputusan. Oleh karena itu, pengertian politik secara luas mencakup masalah-masalah pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam kehidupan keluarga sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan.

Dalam konteks Islam, berpolitik tiada lain adalah sebuah cara mengatur urusan kehidupan bersama demi mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik dalam Islam sebenarnya diorientasikan untuk memperoleh dan melindungi kemaslahatan bersama. Politik tidak semata-mata dilihat sebagai masalah duniawi, tapi pada saat yang sama juga dapat menjadi

sarana ideal memperoleh kebahagiaan di akhirat.

Kondisi perempuan dalam bidang politik semakin terpuruk ketika ajaran agama yang sebenarnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kesamaan, keadilan dan kesetaraan ditafsirkan sesuai kehendak dan kepentingan ideologi patriarki. Akibatnya, relasi manusia, khususnya relasi laki-laki dan perempuan, yang sebenarnya memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam ajaran agama menjadi terdistorsi akibat dominannya nalar patriarki dalam penafsiran.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, selalu saja laki-laki menjadi pemegang kekuasaan dan penentu dalam pengambilan keputusan, meski itu menyangkut kepentingan perempuan. Sebaliknya, kaum perempuan selalu menjadi kelompok yang dikuasai dan tidak disertakan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan keluarga, terlebih lagi dalam kehidupan publik.

Untuk mengubah kondisi yang timpang itu, tiada jalan lain kecuali memberdayakan perempuan dan membuat mereka melek politik serta berani memperjuangkan hak-haknya paling mendasar, termasuk hak berpolitik secara bebas. Dalam konteks inilah buku karya Siti Malaiha Dewi tampil sangat signifikan. Selamat membaca!

Jakarta, 24 Agustus 2009

PENGANTAR PENULIS

Buku ini bisa hadir di tengah pembaca sebetulnya berawal dari ketidakmampuan saya menjawab pertanyaan atau tepatnya sindiran teman-teman, “kapan punya buku yang diterbitkan?”, “Ibu, apa tidak sebaiknya komentar yang di Koran kemarin dibuat buku?” atau gurauan teman di beranda *Face book* yang saya rasakan lebih sebagai kritik teramat tajam, “Kartini tidak hanya bicara loch...tetapi menulis dan menulis. Jadi jangan hanya bicara di seminar, sekali-kali kumpulkan dalam tulisan. Biar jadi aktivis perempuan beneran”.

Dan, kesadaran akan pentingnya membukukan sebuah karya akhirnya bersambut karena bersamaan dengan adanya stimulant bantuan penerbitan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Kudus. Untuk itu, ucapan terima kasih pertama kali saya haturkan kepada pak Fathul Mufid selaku kepala P3M.

Namun, kebingungan mulai terasa untuk menentukan buku apa yang hendak saya susun dalam waktu singkat, tidak lebih dari dua bulan. Akhirnya, muncul ide dari sahabat saya, Eros (‘thanks sobat’) agar saya menuliskan sesuatu yang tidak jauh dari diri

saya yaitu 'perempuan', dan tidak jauh dari moment penulisan yaitu kontestasi politik_pemilihan presiden dan wakilnya. Akhirnya terumuskanlah tema besar buku ini 'Perempuan dan politik'.

Buku - buku tentang 'politik dan perempuan' memang sudah tak terhitung jumlahnya. Sebut saja, 'Politik Perempuan Bukan Gerhana' yang ditulis Ani Widayanti Soetjipto. Buku tersebut memotret jatuh bangunya gerakan perempuan Indonesia pada babakan 1999 - 2004 dalam mengampanyekan peningkatan representasi politik perempuan. Buku ini juga menjelaskan mengapa partisipasi perempuan menjadi keharusan, mengapa perlu tindakan *affirmative* untuk perempuan. Kemudian, Maria Ulfah Anshor dengan buku 'Nalar Politik Perempuan Pesantren', merupakan ijthad politiknya sebagai seorang perempuan pesantren. Mbak Maria melalui bukunya merayu kita untuk membuka mata bahwa politik adalah niscaya. Baginya, politik justru menjadi roda kesinambungan kerja pemberdayaan masyarakat, ketika sementara orang masih lebih memilih ranah intelektual dan kultural untuk agenda sosial. Politik diyakininya bisa bekerja untuk memperjuangkan kebersihan, pemberdayaan, keberpihakan dan keadilan. Terutama keadilan gender dengan segenap isu sosial yang melingkupinya. Politik juga harus bekerja untuk transformasi sosial bagi perempuan sebagai kelompok mayoritas yang

dimarjinalkan (*silent majority*), dan kelompok-kelompok lain yang rentan kekerasan sosial.

Kalau kedua buku di atas lebih terfokus pada pentingnya perjuangan perempuan pada ranah struktural dan memotret bagaimana perempuan – perempuan bekerja untuk perbaikan perempuan pada level kebijakan, maka buku ini hadir dengan fokus yang beringsut agak berbeda. Buku ini berusaha memotret bagaimana pandangan, sikap, orientasi serta perilaku politik perempuan, khususnya perempuan marginal di tengah perjuangan struktural yang dilakukan sebagian aktivis perempuan. Buku ini berusaha mengungkap dan mendengar suara perempuan marginal, yang selama ini terabaikan, padahal sesungguhnya merekalah yang menjadi faktor penentu berhasil tidaknya perjuangan struktural. Tanpa mereka, perjuangan struktural akan sia-sia. Representasi perempuan di lembaga politik yang mati-matian diperjuangkan aktivis perempuan misalnya, akan sia-sia jika perempuan tidak memilih perempuan.

Dalam buku ini, yang dimaksud kelompok marginal adalah pengemis perempuan, pengamen perempuan, tukang parkir perempuan, buruh rokok perempuan, etnis china perempuan, guru ngaji perempuan, perempuan pesisir, penjahit perempuan, dan lainnya, yang berusia 40 tahun ke atas dan berada di tiga kabupaten seputar lereng Gunung Muria seperti

Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Usia 40 tahun dipilih dengan alasan bahwa mereka telah melewati beberapa zaman, yaitu zaman orde baru, orde reformasi dan pasca reformasi.

Buku ini sebagian besar ditulis dan didasarkan pada wawancara lisan riwayat hidup atau naratif personal. Meskipun begitu, buku ini tidak hanya menyajikan transkrip mentah. Ada beberapa kata yang ditulis apa adanya, namun sebagian besar ditulis ulang menjadi cerita yang mengalir lancar dengan bahasa 'aku' ataupun 'saya', sehingga kekhawatiran Gayatri Spivack akan terjadinya 'kekerasan epistemologis' oleh kaum intelektual terhadap kelompok *subaltern* tidak akan terjadi. Dengan model penulisan seperti ini maka penulis berusaha membebaskan pembaca untuk menginterpretasikan dan memaknai fakta-fakta yang ada.

Akhirnya, setelah melewati berbagai kesulitan, buku ini bisa terselesaikan. Dan, di antara kesulitan tersebut ternyata Tuhan pun memberi kemudahan. L@PPiS (Lembaga Pengkajian, dan Pemberdayaan Perempuan Kudus) dimana saya mengabdikan, mendapat kesempatan dari UNDP untuk melakukan pendidikan politik bagi perempuan marginal bersama KPI (Kaukus Perempuan Indonesia) Jawa Tengah dan PPSG UKSW Salatiga. Kemudian menjelang penyelesaian buku ini, Kesbangpol Depdagri juga memberikan kesempatan

untuk melaksanakan pementasan wayang dalam rangka sosialisasi pilpres 2009 bagi pemilih perempuan. Dua *moment* di atas menjadi media terbangunya hubungan 'emosional' saya dengan informan.

Maka sudah menjadi keharusan saya untuk menghaturkan terima kasih yang mendalam pada segenap informan, ibu-ibu yang sangat luar biasa, 'engkaulah pendekar perempuan sejati'; *crew* L@PPiS; Teman-teman Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus (jenk nink, jenk imud, Ny. Ani Soedarsono, primi, mufa, Rini D. Susanti, kang Said), dan teman – teman di Forum PSG/W Jawa Tengah (Bu Ida IAIN Semarang, Bu Margo UMM, Bu Wahyu UNTAG, Mbak Ina UKSW, Mbak Mila UNISSULA, Mbak Khusnul STAIN Purwokerto, mbak Nana STAIN Pekalongan, Mbak Irma STAIN Solo, mbak Rodiyah UNNES, dan bu Ummu UNISSULA), 'makasih atas persahabatan yang indah selama ini'; kemudian, Sahabati fatayat Kudus, dan *crew* PARADIGMA, yang telah banyak menyumbangkan tenaga dan pikiran, serta semua warga sedulur sikep yang telah menerima kami sehingga program *Participatory Action Research* (PAR) bisa terlaksana di antara penulisan buku ini dan untuk Pak Mahmudi, "terima kasih telah menunjukkan kebodohan-kebodohan saya". Tak lupa, salam hormat dan terima kasih atas pengantar yang diberikan oleh Bu Musdah Mulia, 'saya sungguh tersanjung'.

Terakhir, terima kasih untuk ayah dan ibundaku, 'Duh Gusti...cintaku padanya tak bisa dilepaskan, berikanlah mereka *gesang istiqomah, lan pejah khusnul khotimah*, sisakanlah kesempatan untukku agar bisa membalas atas apa yang pernah dilakukan padaku'. Dan, sujudku untuk-mu belahan jiwaku yang sering melalui hari-hari sendiri, menjadi Bapak sekaligus Ibu, I LOVE YOU FULL. Juga untuk seluruh keluarga besar di Kudus (EnWe, iyud, Ey, cimux, dan semua orang yang dengan gayanya masing-masing telah hadir saat saya senang, sedih dan bosan, semoga kebersamaan dan bantuan yang diberikan mendapatkan pahala dari Yang Kuasa.

Yang tak kalah penting, tentu saya juga sadar bahwa kehadiran buku yang terdesain cantik dan mungil ini tak lepas dari balutan kreatifitas "Tim Briliian" di bawah payung Rumah Kreatif "Brilliant Media Utama" yang gawangi oleh Kang Said dan kawan-kawan. Karena itu apresiasi dan terima kasih juga saya persembahkan kepada mereka semua. Semoga semakin sukses dan mulia aja.

Akhirnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk putri saya yang masih tunggal, 'Dinar Nur Fadila' yang telah banyak kehilangan waktu bermain dengan saya, hingga suatu hari dia berkata, "Aku kalo besar gak mau kerja seperti mama, capek!". Mungkin Dia masih terlalu muda untuk memahami apa yang

sebetulnya saya kerjakan. Tapi, saya berharap kelak dia dan perempuan-perempuan lainya dapat mengambil pelajaran meski mungkin tak seberapa. Dan, kepada seluruh aktivis perempuan yang tak kenal lelah memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan hak asasi perempuan, semoga tulisan ini bisa menjadi tambahan amunisi baik secara konseptual maupun kontekstual. Salam...

Kudus, September 2009

Siti Malaiha Dewi

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit.....	v
Kata Pengantar	ix
Pengantar Penulis.....	xiii
Daftar Isi	xxi
Bagian I : PRAWACANA	1
Bagian II: Orientasi Politik Perempuan:	
DATA DAN FAKTA	23
A. Perempuan Pedagang Pasar	25
B. Ibu Rumah Tangga	33
C. Perempuan Buruh Rokok	38
D. Perempuan Pesisir	43
E. Perempuan Pembuat Kue.....	46
F. PNS Perempuan.....	48
G. Perempuan Pedagang Malam	51
H. Seorang Bidan.....	55
I. Buruh Tani Perempuan	60
J. Seorang Tukang parkir Perempuan	64
K. Perempuan Pembuat Batu Bata	69
L. Seorang Dalang Perempuan	75
M. Perempuan Samin	81
O. Seorang Wartawati	95
P. Seorang Guru perempuan	101

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN MARGINAL

xxi

Q. Perempuan Penanak Nasi	107
R. Seorang Pengemis Perempuan.....	113
DAFTAR PUSTAKA	119
TENTANG PENULIS.....	125

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
di lingkungan Departemen Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Yogyakarta, 15 Februari 2024

BAGIAN I

PRAWACANA

Demokrasi tanpa melibatkan perempuan di dalamnya, pasti bukan demokrasi sesungguhnya.

(Ani W Soetjipto, 2004)

Walaupun dengan nuansa dan tekanan yang berbeda namun pada dasarnya manusia pada saat ini telah banyak yang menyepakati bahwa bentuk pemerintahan atau masyarakat yang demokratis adalah bentuk yang paling ideal jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya, seperti kerajaan, oligarki, otoritarian atau totalitarian. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa demokrasi adalah '*the best of the worse*' dari bentuk-bentuk pemerintahan dan masyarakat lain yang pernah ada atau masih ada di dunia ini.¹ Afan Gaffar menyebutkan dua alasan memilih demokrasi: *Pertama*, demokrasi memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat; *kedua*, demokrasi memberi peluang kepada mereka untuk ambil peran dalam diskursus pembuatan kebijakan publik.²

1 Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Foundation, 2003, hlm. 1

2 Afan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. viii

Senada dengan Afan Gaffar, Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Tim ICCE UIN³ mengatakan bahwa alasan dipilihnya demokrasi oleh sebuah negara karena demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara.

Secara etimologi "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Sistem pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal : *pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*); *kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*); *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).⁵

Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan legitimasi tidaknya suatu pemerintahan di mata rakyat. pemerintahan mempunyai legitimasi jika mendapat pengakuan dan dukungan rakyat, sebaliknya sebuah

3 ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 108

4 Saiful Arif, dkk, *Demokrasi: Sejarah, praktik dan dinamika Pemikiran*, Malang, Averrous Press, 2006, hlm.1

5 ICCE UIN, *Op. Cit*, hlm. 112

pemerintahan tidak mempunyai legitimasi jika tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa kekuasaan pemerintahan diperoleh melalui pemilihan dari rakyat atau disebut dengan pemilu, bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supra natural.

Dalam kondisi normal atau wajar biasanya pemilu dilakukan secara berkala (rutin). Misalnya, di Indonesia, pemilu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali, pemilu pertama kali diselenggarakan pada Tahun 1955, Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan yang baru saja terlaksana yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden pada Tahun 2009.

Masing-masing pemilu yang telah dilaksanakan memiliki cerita dan catatan sejarahnya sendiri. Pemilu Tahun 2004, misalnya. Pemilu ini disebut – sebut paling demokratis dalam sejarah Bangsa Indonesia karena rakyat dapat memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen beserta presiden dan wakil presiden.

Hal penting lainnya yang tercatat dalam pemilu 2004 tersebut adalah adanya kebijakan *affirmative action*⁶.

⁶ *Affirmative action* di Indonesia adalah kebijakan yang memperhitungkan representasi suara (aspirasi) perempuan minimal 30 persen, kebijakan ini juga dikenal dengan kuota 30 persen bagi perempuan. Angka 30 persen bukan angka

Gadis Arivia mendefinisikan *Affirmative Action* sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih substantif dan bukannya formalitas, bagi kelompok - kelompok tertentu seperti kaum perempuan.⁷

Kebijakan ini dianggap penting guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik. Basis pemikiran lainnya adalah keyakinan bahwa dengan maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis, maka kepentingan perempuan akan terwakili. Diyakini, masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru yaitu dunia yang bebas diskriminasi.⁸

Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok pro mengatakan bahwa Ketimpangan keterwakilan pada lembaga - lembaga politik yang terjadi saat ini tidak mungkin terkejar tanpa ada suatu tindakan khusus atau *affirmative action*.

yang jatuh dari langit, tapi adalah hasil penelitian yang telah diperkuat dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan yang dikeluarkan PBB dan telah diberlakukan secara internasional di banyak negara. 30 persen adalah angka minimal, angka kritis untuk bisa membuat perbedaan dan perubahan kebijakan. Ani W. Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 220.

7 Gadis Arivia dalam pengantar bukunya Ani Widayani Soetjipto, *ibid*, hlm. 23,

8 Adriana Venny, "Pesta Demokrasi : Berkah atau Mimpi Buruk" dalam *Jurnal Perempuan No. 34 Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, hlm. 4.

Ibarat sebuah pertandingan, menjadi tidak adil apabila "start" nya tidak sama. Tindakan afirmatif ini juga sesuai dengan isi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), pasal 4, yang berbunyi :

"Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan laki-laki dan perempuan secara *de facto* tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tetapi hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari kesetaraan kesempatan dan tindakan telah tercapai".⁹

Sedangkan kelompok yang kontra mengatakan bahwa ibarat permainan maka tidak 'fair' jika ada faktor belas kasihan pada salah satu pemain dan akan riskan jika kuota adalah sekedar belas kasihan yang tidak bisa merepresentasikan kepentingan perempuan, karena belum tentu perempuan yang bisa menjadi anggota parlemen mempunyai kapabilitas dan berperspektif gender.¹⁰

Mengenai pro dan kontra itu sendiri, setidaknya Drude Dahlerup dari University of Aarhus di Denmark dalam Ratnawati (2004) mengemukakan beberapa alasan pro dan kontra sebagai berikut:¹¹

9 MB Wijaksana (Penyunting), *Modul Perempuan Untuk Politik*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, hlm. 12.

10 Lihat Ratnawati, "Potret Kuota Perempuan di Parlemen", dalam *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 7 No. 3, Maret 2004, hlm. 295

11 Ratnawati, *ibid.*, hlm. 306

Tabel 1.1
Pro dan Kontra *Affirmative Action*

No	Pro	Kontra
1	Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasi tetapi memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan terlibat secara adil pada posisi publik;	Kuota menentang prinsip kesetaraan bagi semua karena perempuan diberikan preferensi;
2	Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa dengan adanya perempuan duduk bersama dalam suatu komite atau mejelis, maka tekanan yang sering dialami oleh sebagian perempuan akan berkurang;	Kuota tidak demokratik karena pemilih harus dapat memutuskan siapa yang dipilih;
3	Perempuan mempunyai hak representasi yang setara; dan pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik;	kuota memperlihatkan Secara tidak langsung para politisi dipilih karena gendernya bukan karena kualifikasinya akhirnya, banyak kandidat yang memenuhi syarat akhirnya tersingkirkan;
4	Perempuan memiliki kualitas seperti laki-laki, tetapi selama ini kualifikasi perempuan dinilai rendah dan diminimalkan dalam sistem politik yang didominasi laki-laki;	Banyak perempuan yang tidak ingin dipilih hanya karena mereka adalah perempuan;

5	Adalah fakta bahwa parta-partai politik yang mengontrol masalah pencalonan dan bukan para pemilih yang menentukan siapa yang akan terpilih; pengenalan kuota mungkin menyebabkan konflik tetapi hanya bersifat sementara.	Pengenalan kuota menciptakan konflik yang signifikan dalam organisasi politik.
---	---	--

Sumber : *Drude Dahlerup dari University of Aarhus di Denmark dalam Ratnawati (2004).*

Terlepas dari pro dan kontra mengenai tindakan afirmatif tersebut, dengan dikeluarkannya UU No 31/2002 tentang partai politik dan UU No. 12/2003 tentang pemilu yang memuat klausul mengenai tindakan afirmatif untuk perempuan¹² telah menjadi 'tonikum' tersendiri bagi aktivis perempuan. Banyak aktivis perempuan berbondong masuk ke partai politik. Ada 2.507 atau 32,23% perempuan menjadi kandidat DPR RI pada pemilu 2004.¹³ Namun, tanda tanya besar segera muncul hanya 11 persen perempuan yang berhasil melenggang ke senayan.¹⁴ Kemudian, calon

12 Tepatnya Pasal 65 ayat (1) yang berisi: "Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen".

13 lihat Ani W. Soetjipto, *Op.cit.* hlm. 266

14 Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah sistem pemilu yang setengah hati dan regulasi kuota yang tidak wajib sifatnya. Kata 'dapat' yang digunakan pada pasal 65 ayat 1 di atas menyediakan celah bagi parpol untuk menegaskan sifat sukarela atau rekomendatif dari UU tersebut, lihat Ani W. Soetjipto, *Op.cit.* hlm. 272

presiden Megawati Soekarnoputri yang berjenis kelamin perempuan pun gagal menjadi presiden, padahal jumlah pemilih perempuan adalah yang terbesar.

Kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah aktivis perempuan, menjelang pemilu 2009, angin segar mulai dirasakan dengan adanya sejumlah aturan baru yang berpihak pada peran perempuan yang mulai diterapkan, antara lain, partai politik dapat menjadi peserta Pemilu 2009 setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Tak cukup hanya di kepengurusan partai, daftar bakal calon anggota legislatif pun diharuskan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahkan, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, Pasal 55 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 mencantumkan ketentuan agar setiap daftar caleg partai politik, pada setiap tiga bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon atau yang disebut dengan *zipper system*.

Dalam prakteknya, *zipper system* ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, sangat sulit menemukan jalan keluar agar perempuan dapat duduk dengan menggunakan *zipper system* atau keterwakilan minimal satu perempuan dari tiga caleg jadi di setiap partai politik. Aturan *zipper* yang digunakan partai-partai politik banyak dipahami secara keliru. Caleg

perempuan justru ditempatkan di nomor urut 3, 6, dan kelipatannya. Formasi seperti itu tidak akan mampu menaikkan keterpilihan perempuan dalam daftar caleg partai. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan keputusan MA pada tanggal 23 desember 2008 yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 214 (a,b,c,d, dan e) mengenai sistem nomor urut. Dengan demikian partai politik dalam menetapkan anggota legislatif yang berhak duduk di DPR periode 2009-2014 harus berdasarkan pada perolehan suara terbanyak masing-masing calegnya.

Pihak yang "paling" merasa dirugikan dengan mekanisme ini adalah caleg perempuan. Mereka harus bertarung di pasar bebas politik yang secara sosial dan kultural, para pelakunya didominasi laki-laki. Dengan keahlian dan pengetahuan politik praktis yang sangat terbatas serta ketersediaan dana yang minim, caleg perempuan "dipaksa" harus berhasil merebut suara pemilih.

Banyak aktivis perempuan yang geram dengan keputusan ini, diantaranya Muetia Hatta dan Nursyahbani Katjasungkana, yang menganggap bahwa keputusan MK itu adalah sebuah upaya penggembosan bagi kelompok perempuan. Baginya, argument yang diberikan ketua MK agar caleg perempuan tidak perlu cemas, karena Pasal 55 UU No. 10/2008 tidak

dibatalkan hanyalah retorika politik. Sebab dengan kesadaran politik masyarakat yang masih belum menggembirakan, mekanisme suara terbanyak hanya akan melahirkan politisi demagog.¹⁵ Realitas politik ini semakin memperbesar *gender gap* atau ketidaksetaraan gender pada representasi politik di Indonesia. Kebijakan *affirmative action* yang telah menjadi kewajiban negara, pasca diratifikasinya Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, menjadi tidak jelas. Tindakan khusus yang bersifat sementara ini kehilangan esensinya. Pada akhirnya kehidupan politik dibangun dengan membiarkan perempuan berada pada posisi pinggiran atau *peripheral*, berjuang sendiri menuju pusat lembaga pembuat dan pengambil kebijakan. Karena itu, pemilu 2009 menjadi ujian paling berat bagi caleg perempuan untuk bisa meraih kursi dewan.

Dan, pemilu legislatif tahun 2009 serta pemilihan presiden sudah selesai digelar. Lagi-lagi aktivis perempuan merasakan kekecewaan. Meski jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki, tetapi ternyata perjuangan perempuan untuk mencapai posisi struktural belum bersambut dengan 'perempuan yang memilih perempuan'. Maka menarik untuk dilihat bagaimana orientasi politik perempuan khususnya perempuan marginal dan faktor-faktor yang melatarbelakangi orientasi politik mereka.

15 Seputar Indonesia, 18/1/08

Metode, Tujuan serta Kerangka Pemikiran

Menulis tentang perempuan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi perempuan marginal. Menterjemahkan bahasa mereka saja sudah menjadi kesulitan yang luar biasa, apalagi sampai bisa mengungkapkan pandangan-pandangan politik mereka. Hal ini sangatlah wajar, mengingat, *pertama*, selama ini perempuan jarang dijadikan sumber pengetahuan, *kedua*, perempuan dijauhkan dari politik formal¹⁶. Namun, Kondisi tersebut justru menjadi tantangan bagi saya untuk membuktikan bahwa 'hanya perempuan yang bisa pahami perempuan', dan akhirnya saya memutuskan untuk melihat 'kecenderungan – kecenderungan' politik mereka dengan cara menggali pengalaman dan riwayat hidup mereka.

Walhasil, buku ini sebagian besar ditulis dan didasarkan pada wawancara lisan riwayat hidup atau naratif personal. Walter L. William menjelaskan bahwa:

“Naratif personal terutama bernilai agar seorang pembaca bisa melihat sebuah budaya asing dari dalam. Meskipun tindakan mengumpulkan ceritera

16 Politik disini dilihat sebagai kegiatan *how to exercise the power* yang membatasi lingkup aktivitas seperti *voting* (pemungutan suara), *lobby* (lobi), *campaign* (kampanye), dan lainnya yang sejenis. Lebih jelas lihat Ani Widyani Soetjipto, *op.cit* hlm.26, bukan politik yang diterjemahkan oleh gerakan feminis radikal sebagai *the personal is political* bahwa setiap kegiatan dimana ada relasi kekuasaan maka itu adalah politik, termasuk relasi dalam wilayah privat. Lebih jelas lihat Ani Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta: Jalasutra, 1998, hlm 67.

memerlukan kerjasama, dan penerjemahan serta editing yang mencerminkan latar belakang budaya dan kepribadian peneliti/penulis, riwayat hidup tetap merupakan cara unggul untuk memahami sebuah masyarakat dari perspektif pelaku dalam masyarakat tersebut. Ini bukan untuk mengingkari bahwa seseorang mungkin mendistorsi atau mengidealkan apa yang mereka katakan mengenai kehidupannya dan mungkin menghindari untuk menceritakan suatu topik tertentu. Sebuah riwayat hidup bukanlah kebenaran, tetapi ini adalah pemahaman seseorang terhadap apa yang telah terjadi dan kekuatan dari naratif personal adalah bahwa orang yang diteliti, (bukanya peneliti) menggambarkan dan memilih hal apa yang paling berarti".¹⁷

Meskipun begitu, buku ini tidak hanya menyajikan transkrip mentah. Ada beberapa kata yang ditulis apa adanya, namun sebagian besar ditulis ulang menjadi cerita yang mengalir lancar dengan bahasa 'aku' ataupun 'saya', karena tujuan buku ini adalah membiarkan perempuan bicara sendiri tentang dirinya. Jadi kekhawatiran Gayatri Spivak bahwa akan terjadi kekerasan epistemologis terhadap informan, tidak akan terjadi pada penulisan buku ini.

Dengan model penulisan seperti ini maka penulis berusaha membebaskan pembaca untuk menginterpretasikan dan memaknai fakta - fakta

17 Water R. William, *Kehidupan Orang Jawa, Wanita dan Pria dalam Masyarakat Indonesia Modern*, (terj) Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995, hlm. lx.

tentang kehidupan dan orientasi politik perempuan marginal tersebut berdasar 'stock of knowledge' pembaca sendiri.

Marginal disini merujuk pada definisi Ranajit Guha dalam 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India' sebagai 'mereka yang bukan elite' dan definisi yang dibuat oleh Antonio Gramsci yang menterjemahkan marginal sebagai "kelompok inferior", yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa, seperti petani, buruh, dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan "hegemonik",¹⁸ atau yang disebut Gayatri Chakravorty Spivak sebagai kelompok *Subaltern*. Dalam buku ini, yang dimaksud kelompok marginal adalah pengemis perempuan, pengamen perempuan, tukang parkir perempuan, buruh rokok perempuan, guru perempuan, penjahit perempuan, dan lainnya, yang berusia 40 tahun ke atas dan berada di tiga kabupaten seputar lereng Gunung Muria seperti Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.

Usia 40 tahun dipilih dengan alasan bahwa mereka telah melewati beberapa zaman, yaitu zaman orde baru, orde reformasi dan pasca reformasi, yang sarat dengan perkembangan dan perubahan. Dan, pengalaman mereka yang bisa dikategorikan sudah

18 http://www.kunci.or.id/esai/misc/antarksa_subaltern.htm

'tua' merupakan 'pitutur' yang berharga bagi generasi muda dalam mendapatkan kehidupan bernegara yang lebih baik di masa mendatang, dan secara akademis pengalaman-pengalaman perempuan tersebut kata Sandra Harding akan menjadi sumber empiris dan teoritis bagi ilmu pengetahuan¹⁹, serta penyelidikan-penyelidikan ilmiah berikutnya.

Sebenarnya, dalam konteks penelitian ilmu sosial, sejak tahun 1970 di barat telah berkembang penelitian tentang perempuan atau yang disebut dengan riset "*feminist perspective*". Metodologi penelitian ini berkembang dalam lingkungan akademik di Barat sebagai konsekuensi dari rasa tidak puas, khususnya di kalangan akademisi, terhadap kondisi ilmu pengetahuan yang dinilai bersifat *androsentris*. Dianggap *androsentris* karena ilmu pengetahuan pada umumnya menyusun konsep atau teori dengan cara mengasumsikan perempuan sebagai obyek pasif, membuat perempuan "*tidak kelihatan*", atau malah menjadi "*misogyny*" (sikap tidak menyukai perempuan). Ciri lain yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat *androsentris* adalah adanya kebiasaan mengadakan "*overgeneralization*" dengan membuat pernyataan yang berlaku bagi kedua jenis kelamin, sekalipun studi yang

19 Sandra Harding (Ed), *Feminism and Methodology: Social Science Issue, Bloomington dan Indianapolis*, dalam Rachmad Hidayat, *Kapan Ilmu Akan Berubah?: Lebih Dekat Kepada Metodologi Feminis*, Jurnal Perempuan No. 48, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006, hlm. 32.

dibahas hanya satu kelompok jenis kelamin tetapi hasilnya diberlakukan bagi keduanya.²⁰ Dengan metode penelitian berperspektif perempuan bias-bias tersebut berusaha diminimalkan, sehingga terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dan tidak *sexist*.²¹

Namun, dalam penelitian berperspektif perempuan, perempuan tidak hanya sekedar diteliti atau sekedar sebagai obyek akademisi saja, bukan pula hanya untuk kepentingan pembuat kebijakan, atau untuk membagi kepedulian kepada masyarakat tentang nasib perempuan. Tetapi lebih dari itu, penelitian berperspektif perempuan harus memberi manfaat dan bermaksud untuk membantu memperbaiki nasib perempuan, terutama yang disebabkan karena hubungan gender yang timpang. Kalau sekedar menempelkan kata '*perempuan atau wanita*', sebenarnya kita baru bicara '*tentang perempuan*' karena implikasi dari semua itu tidak secara langsung dirasakan oleh perempuan. Perempuan hanya menjadi obyek. Akan tetapi ketika semua hal tersebut berimplikasi langsung kepada perempuan, menyentuh kehidupan perempuan, terlebih '*mendengar suara perempuan*', dan mengakomodir aspirasi perempuan, maka kita sebenarnya sedang

20 Eicher, M. *Nonsexist research Methods: A Practical Guide*. London: Allen & Unwin Inc, 1991 dikutip oleh Tri Marhaeni dalam Jurnal Studi Gender Palastren, Volume 2, nomor 1 Juli 2009, hlm.3

21 Saptari, R. dan Holzner, B. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997 dikutip oleh Tri Marhaeni, *Ibid*, hlm.3

berbicara 'sesuatu untuk perempuan'.²²

Jadi, Penelitian dan penulisan berperspektif perempuan sebenarnya adalah penelitian yang tidak hanya menganggap bahwa yang layak diteliti dan ilmiah hanyalah laki-laki, akan tetapi perempuan juga layak untuk diteliti.²³ Dan, buku ini pun berusaha tidak hanya menulis tentang perempuan tetapi mencoba mengungkap persoalan-persoalan hidup yang dihadapi oleh perempuan baik di wilayah domestik maupun publik, di dalam rumah tangga maupun di dunia kerja mereka, baru kemudian diungkap mengenai orientasi politik mereka.

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan atau kelompok dalam suatu struktur masyarakat terhadap suatu obyek politik. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik.²⁴

Almond mengklasifikasikan orientasi seseorang terhadap obyek-obyek politik, sebagai berikut:

1. Orientasi Positif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi

22 Tri Marhaeni, *ibid*, hlm. 4

23 Tri Marhaeni, *ibid*, hlm. 4

24 David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985.

kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

2. Orientasi Negatif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, evaluasi dan perasaan negatif yang tinggi terhadap obyek politik.
3. Orientasi Netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan oleh frekuensi ketidakpedulian yang tinggi, memiliki tingkat orientasi yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap obyek-obyek politik.²⁵

Orientasi politik mempengaruhi sikap politik seseorang. Sikap terbentuk dari proses sosialisasi yang panjang, mulai manusia baru lahir sampai dewasa. Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati.

Dalam tradisi budaya patriarkhi²⁶ dan

25 Gabriel A Almond dan Verba, Sidney. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1990

26 Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, Jakarta : Yayasan Bentang Budaya dan Kalyanamitra, 1996, hlm 1, mengemukakan bahwa secara harfiah kata patriarki berarti kekuasaan bapak atau "patriarkh (*patriarch*)". Mulanya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis "keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki", yaitu rumah tangga besar *patriarch* yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan si laki-laki penguasa itu. Sekarang istilah ini digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan

feodalisme²⁷, 'politik' diklaim sebagai dunianya laki-laki karena dianggap sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras dan memiliki konotasi negatif, sementara perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik saja. Istilah yang sangat populer misalnya *political is dirty*. Karena faktor keras dan kotornya dunia politik ini, banyak orang berpandangan kalau politik memang milik laki-laki. Pandangan ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam masyarakat, khususnya perempuan dalam menentukan orientasi politiknya. Pandangan tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam segala wilayah kehidupan termasuk juga wilayah politik formal.

Rendahnya keterwakilan perempuan di dewan dan di partai politik adalah bukti nyata adanya peminggiran terhadap perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sunyoto Usman bahwa memang telah tampak perempuan sebagai pemimpin dalam bidang politik, namun kebanyakan dari mereka

tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Di Asia Selatan, misalnya, disebut *pitrasatta* dalam bahasa Hindu, *pidarshahi* dalam bahasa Urdu dan *pitratontro* dalam bahasa Bangla.

27 Feodalisme adalah sebuah sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin, yang biasanya seorang bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut vazal. Para vazal ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para vazal pada gilirannya ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi mereka upeti. Dengan begitu muncul struktur hirarkis berbentuk piramida. "<http://id.wikipedia.org/wiki/Feodalisme>", hasil *download* 15-06-2006.

berada di pinggiran (*Periphery zone*) dan kurang kuat pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan.²⁸ Padahal populasi dan jumlah pemilih perempuan, jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, sehingga hal itu menjadi tidak sebanding dengan realitas minimnya produk politik yang memihak pada kepentingan perempuan.

28 Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 hlm. 114

BAGIAN II
ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN:
DATA DAN FAKTA

A. Perempuan Pedagang Pasar

“Bagi saya pemilu tidak ada dampak langsung bagi saya...
Saya menyoblos dengan harapan ada perbaikan ekonomi.
Agar kebutuhan sehari-hari saya terpenuhi...”

Suasana pasar Mayong sangat ramai pada hari Jum'at (3 Juli 2009). Ibu Irfan terlihat sibuk menata pakaian yang telah ditawarkan pelanggannya. Begitu pula pelanggan yang menyambangi lapak atau kios pakaiannya.

Berkali-kali dalam wawancara, ia harus mengelap peluhnya yang telah membasahi kening dan lehernya. Suasana pasar yang panas dan pengap, tidak menghalanginya untuk terus berdagang. Semuanya rintangan itu, menurutnya tak lebih dari cobaan hidup yang harus dilalui.

Kios Ibu Ltf cukup sederhana. Untuk membatasi kiosnya dengan kios lainnya hanya menggunakan bambu yang ditata menyerupai pagar. Almari tempat menyimpan barang dagangannya dapat dilihat oleh orang yang melintas kiosnya, sebagaimana kios-kios kebanyakan di sana.

Ibu Ltf bisa dibilang sabar, ia tidak mempermasalahkan minimnya sarana kesehatan yang ada. Kamar mandi yang agak jauh dari kiosnya di pasar yang hanya berlantai satu ini, terkadang menyulitkannya membagi waktu. Ia harus berpikir dua kali dan tidak jarang meminta bantuan tetangga kiosnya untuk menjaga kios, karena ia harus ke kamar mandi.

Menilik kembali kemiskinan yang dialami di awal-awal perkawinannya, ia merasa bersyukur karena kehidupan materialnya telah membaik seperti memiliki motor yang memudahkan dia pulang pergi ke pasar mesti diantarkan suaminya

Perbaikan nasib yang dilami Ibu lutfiyah baru terjadi beberapa tahun belakang ini. Setelah ia membuka kios pakaian di pasar, ekonomi keluarganya membaik. Karena sumber ekonomi keluarga bertambah. Sebelumnya hanya menjual jajanan dan terkadang menjual nasi bungkus. Sementara suaminya berprofesi sebagai tukang jahit. Sekarang ia tidak menjual nasi, tetapi masih membuat jajan dan melayani pesanan. Ia telah yakin dengan beralih profesi berdagang pakaian.

Ibu Lutfiyah tinggal di sebuah rumah dengan situasi sosial yang sangat ramah terhadap tetangga. Rumahnya berada di lingkup keluarga. Ia menempati rumah warisan dari orang tua yang harus dibagi dengan saudara sekandung lainnya.

Ia tinggal bersama suaminya yang telah berusia 47 tahun dan kedua anak lelakinya. Anak pertama berumur 22 tahun, masih sekolah di sebuah kampus di Semarang. Yang kedua, berumur 14 tahun, masih belajar dibangku SMP.

Saya lahir di desa Singorojo, Kec. Mayong Jepara, tanggal 24 Mei 1967. Saya hidup dari keluarga serba kurang. Ayah berprofesi sebagai petani, sementara ibu jualan jajan di pasar. Saudara saya berjumlah 6, empat laki-laki dan 2 perempuan, termasuk saya. Dua saudara laki-laki saya merantau ke Jakarta, dan yang dua bersekolah dan mondok di pesantren. Sementara pendidikan saya hanya sampai pada tingkat sekolah dasar. Kendala finansial saat itu membuat saya harus berhenti sekolah, dan mulai belajar bekerja dengan membantu ibu saya.

Kebiasaan yang ada pada ibu barangkali menurun pada diri saya. Pekerjaan saya sekarang ini, tidak jauh beda dengan ibu saya yang akrab dengan pasar.

Kisah perkawinan saya dengan suami, Ahmad Muchid, berawal perjumpaan di pasar. Seiring waktu, kami mulai mengenal satu sama lain. Kebetulan kakak saya, telah mengenal saudara-saudara suami saya. Maka, ketika, saya hendak dipinang olehnya, orang tua serta kakak saya membolehkan.

Awal pernikahan, saya membuat jajan dan dijual ke pasar. Warisan ilmu itu yang saya terima dari ibu saya. Lama-kelamaan, teman-teman di pasar mendorong saya untuk berdagang di pasar. Saya pun merundingkannya dengan suami. Suami menyetujui. Tetapi, modal belum ada. Jadi ditunda dulu. Sampai pada akhirnya, ada orang yang menawari kios dengan harga 10 juta. Sistem pembayarannya dicicil, sehingga memudahkan saya untuk membayarnya. Saya juga meminjam uang dari bank untuk menutupi kekurangan itu.

Sebelum berdagang pakaian di pasar, saya juga bekerja paruh waktu di konveksi milik tetangga saya. Sehingga dari profesi itu, kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi.

Saat itu kegiatan saya sehari-hari sangat padat. Setiap pagi hingga siang, sekitar pukul 14.00 WIB, saya di pasar. Setelah itu saya pulang ke rumah menata belanjaan untuk pembuatan jajanan malam harinya. Selain berjualan pakaian perempuan di

pasar, saya juga menyeter jajanan untuk penjual jajan di pasar. Sekitar pukul 22.00 saya baru tidur. Sebelumnya saya membuat tahu bacem terlebih dahulu. Saya memulai aktivitas sebelum subuh. Saya membuat macam-macam jajanan, seperti bakwan jagung, bakwan sayur, dan roti gulung.

Saya berangkat ke pasar setelah selesai membuat jajan, sekitar pukul 06.30, demikian sehari-hari aktivitas saya.

Di rumah ada dua motor. Satu dipake anak kuliah, dan satu lagi dipakai bapak untuk memudahkan pekerjaannya. Saya sebetulnya berminat untuk bisa naik sepeda motor, tetapi malu, sudah mulai tua. Toh, selama ini suami saya atau anak siap mengantar jika ingin pergi ke suatu tempat.

Untuk persoalan penggunaan saya tetap bisa, tetapi tidak sendiri. Saya dibongcengkan anak atau suami saya bila pergi ke suatu tempat. Tidak ada kesulitan dalam penggunaan. Hanya terkadang harus menunggu dulu, jika motor dipakai.

Kesibukan saya tersebut, tidak serta merta membuat saya absen dari pengajian keagamaan. Saya juga sempat mengikuti pengajian di mushola desa seminggu sekali. Keluarga sangat mendukung kegiatan tersebut. Karena ada manfaat positifnya. Pengetahuan agama saya jadi bertambah. Sehingga dapat saya gunakan untuk membimbing anak-anak

saya agar menjadi shaleh. Suami juga mendukung. Namun, seringkali saya kesulitan membagi waktu antara *ngaji* dengan kerja. Kadang, ada pesanan jajan banyak, di tengah jadwal *ngaji*. Sebenarnya saya menyesal tidak dapat mengikuti pengajian, tetapi harus bagaimana. Di sisi lain, saya harus memenuhi pesanan untuk menambah pemasukan keluarga dan biaya sekolah anak. Sementara di saat yang sama saya harus mengaji. Meski begitu, saya tetap berniat untuk mengikuti pengajian minggu mendatang. Dan pesanan jajan tetap saya penuhi

Saya terkadang bingung juga mengapa harga-harga bahan pokok yang saya gunakan untuk membuat jajan, sangat mahal, dan naik terus. Padahal, pada zaman pak Harto, tidak mahal seperti sekarang ini. Meski begitu, kekecewaan saya terhadap pemerintah, tidak membuat saya golput di setiap pemilu digelar.

Saya mulai mengikuti pemilu masih di era Soerharto. Bagi saya pemilu tidak ada dampak langsung bagi saya. Orang kecil seperti saya, hanya tahu kalau saat menyoblos ya datang. Saya menyoblos dengan harapan ada perbaikan ekonomi. Agar kebutuhan sehari-hari saya terpenuhi.

Setiap kali pemilu datang saya tidak pernah menjadi panitia. Tetangga saya yang muda-muda

dan berpendidikan biasanya sebagai panitia. Pilpres 2009 sekarang juga sama. Saya sebagai pemilih saja, tidak ikut di kepanitiaan.

Ketika kampanye saya lebih memilih untuk tidak ikut. Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, seperti di pasar dan membuat jajan. Jika pun ada kesempatan, saya tetap tidak ikut. Sebagai seorang perempuan, saya merasa malu untuk ikut terjun ramai-ramai berkampanye, meskipun ada uangnya saya tetap tidak mau.

Kata tetangga saya, ketika pemilu DPRD 2009 kemarin tim sukses calon membagi-bagikan uang, ada juga sembako. Menurut teman-teman di pasar, uang yang dikasih biasanya 5 ribu, ada juga 10 ribu. Kalau dikasih, saya akan terima. Tetapi tidak berarti calon tersebut saya pilih, saya hanya akan memilih calon yang menurut pendapat saya baik dan mampu. Misalnya dapat menurunkan harga-harga yang tinggi, dapat menyejahterakan rakyat, dan peduli terhadap rakyat kecil seperti saya ini. Pada pemilihan legislatif kemarin, saya memilih calon lagislatif laki-laki. Karena yang saya kenal hanya itu.

Pemilihan predisen kemarin saya milih SBY, begitu juga suami. Menurut saya, jika beliau jadi lagi, beliau sudah mempunyai pengalaman lebih dalam memerintah, jadi tinggal melanjutkan.

Memang, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, harga-harga kebutuhan sehari-hari naik. Saya tidak habis pikir, kenapa kenaikannya sangat tinggi. Tidak seperti pada zaman Soeharto, harga murah semua.

Namun, saya sadar setelah nonton televisi, ternyata Soeharto menghutang dana negara dari luar negeri yang besar, hingga sampai saat ini belum dapat dilunasi oleh pemerintah. Sehingga saya paham mengapa pemerintahan sekarang menaikkan harga, mungkin karena tidak hutang banyak. Saya yakin SBY bisa membuat kondisi aman termasuk keamanan harga kebutuhan sehari-hari.

B. Ibu Rumah Tangga

"saya hanya ingin menjadi seorang perempuan yang berbakti kepada suami... dulu saya pernah diberi amplop yang berisi uang oleh salah satu tim sukses pun saya tolak.

Karena saya tidak ingin membohongi diri sendiri untuk memilih calon yang tidak sesuai dengan penilaian saya...

Saya mengharapkan presiden mendatang adalah orang yang memimpin sungguh-sungguh dan tulus. Perempuan tidak apa-apa, tapi laki-laki lebih baik. Toh dulu sudah ada perempuan yang menjadi presiden tetapi ya begitu-begitu saja."

Rumah di sudut gang desa Pelemkerep rt/w : 1/2 Kec. Mayong Kab. Jepara sangat tenang. Berbagai tanaman hias menghiasai rumah yang dihuni oleh YA, seorang ibu rumah tangga beranak dua, perempuan (7) dan laki-laki (3).

Saya lahir di Jepara, tepatnya di desa Mayong Lor Kec. Mayong, 22 Oktober 1969. Sehari-hari saya di rumah, sebagai ibu rumah tangga. Sebelum menetap di rumah, saya pernah menjadi guru SMA, baru setelah menikah, saya mantapkan niat untuk di rumah, memenuhi tugas sebagai ibu dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga.

Pilihan ini saya anggap yang terbaik. Apalagi setelah saya mempunyai anak. Sehingga kesibukan di rumah bertambah.

Suami saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kabupaten Kudus, sehingga kebutuhan finansial lumayan tercukupi. Kami sudah memiliki sepeda motor, meskipun selalu dipakai suami untuk transportasi sehari-hari ke kantor. Ada keinginan saya untuk bisa, tetapi tidak terlalu mendesak, sehingga saya cukup diantar suami jika hendak bepergian jauh. Di sisi lain, rumah saya dengan pasar jaraknya sangat dekat, kira berjalan 10 menit sudah sampai.

Pernah suatu saat suami menawari untuk belajar tetapi saya tidak mau, maklum merasa sudah agak tua. Cukuplah suami yang mengendarakan.

Selama 5 tahun menikah, kami selalu berdiskusi kalau mau mengambil sebuah keputusan yang hendak diambil, khususnya terkait masa depan anak. Menentukan sekolah kemana,

misalnya. Saya usul dan suami menanggapi, begitu sebaliknya. Tetapi keputusan akhir tetap pada suami.

Dalam hubungan keluarga, kami membagi waktu, khususnya perihal kegiatan yang berhubungan dengan rumah. Jika suami tidak bekerja di kantor, pekerjaan yang biasa saya lakukan dikerjakannya, seperti mencuci baju dan menimang anak. Kebanyakan saya yang mengerjakan. Tetapi jika ada suami, saya sangat terbantu.

Terkadang saya merasa kesepian di rumah sendirian dengan permasalahan anak yang sulit, tetapi saya bisa meredamnya. Dengan pilihan ini, saya hanya ingin menjadi seorang perempuan yang berbakti kepada suami.

Keinginan untuk kembali mengajar memang ada, tetapi tugas sebagai istri di rumah lebih mendesak. Saya juga merasa tidak enak dengan suami saya. Karena jika tetap mengajar, urusan rumah terbengkalai.

Satu-satunya aktivitas saya di luar rumah yaitu mengikuti pengajian seminggu sekali di mushola desa bersama ibu-ibu lainnya. Saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan mereka, bisa cerita-cerita tentang banyak hal. Terkadang saya menemukan dalil tentang keutamaan sebagai ibu yang berbakti kepada suami, sehingga keletihan

sebagai ibu rumah tangga yang selama ini saya jalani dapat terobati. Suami pun sangat mendukung pengajian yang saya ikuti. Bahkan suami sering mengingatkannya kalau saya lupa.

Karena keaktifan saya di pengajian, maka saya pun pernah ditunjuk sebagai panitia pemilihan desa pada pemilu presiden Habibi. Meskipun hanya sebagai anggota, tetapi saya dapat belajar banyak hal. Antara lain tentang pentingnya mengikuti pemilu.

Pemilu saat ini jauh lebih tenang, karena kampanye para calon tidak terjadi besar-besaran. Dahulu sebelum masa SBY, kampanye melibatkan banyak orang. Sehingga suasananya gaduh sekali.

Dalam hal penggunaan hak pilih, saya tidak pernah absen, meskipun saya tidak mendapatkan amplop dari calon. Bahkan, dulu saya pernah diberi amplop yang berisi uang oleh salah satu tim sukses punsaya tolak. Karena saya tidak ingin membohongi diri sendiri untuk memilih calon yang tidak sesuai dengan penilaian saya. Ya, meski menggiurkan dapat uang tetapi itu sama saja menjual suara untuk sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Makanya, saya tidak mau mengambil risiko. Sebagai rakyat kecil dan ibu rumah tangga, saya mengidam-idamkan pemimpin bangsa yang peduli dan tahu nasib rakyatnya. Menjadi pemimpin dengan sebenarnya,

tidak hanya memimpin asal-asalan dan tidak jelas. Saya mengharapkan presiden mendatang adalah orang yang memimpin sungguh-sungguh dan tulus. Perempuan tidak apa-apa, tapi laki-laki lebih baik. Toh dulu sudah ada perempuan yang menjadi presiden tetapi ya begitu-begitu saja.

C. Perempuan Buruh Rokok

"Tidak ada kesan khusus dalam pemilu yang saya ikuti. Kampanye saya juga tidak ikut. Ya, sekadar memilih lalu pulang lagi ke rumah. Toh pemilu tidak ada dampak terhadap hidup saya. Saya kan *wong cilik* yang tidak ada dampak langsung yang saya terima. Intinya, jika saya tidak bekerja tidak ada perbaikan nasib.... Saya biasanya memilih calon yang bisa mengayomi, orang yang berwibawa dan tidak neko-neko"

Di sini ketika pemilihan anggota legislatif 2009 ada yang membagi-bagikan uang. Saya ditawari, di rumah dan di pabrik. Saya terima saja, karena itu merupakan pemberian. Masak diberi, tidak diterima! Tetapi itu tidak mempengaruhi pilihan saya. Saya biasanya memilih calon yang

bisa mengayomi, orang yang berwibawa dan tidak neko-neko.

Pada siang menjelang sore hari rumah Ibu KS sangat ramai. Sebagian besar saudaranya yang bekerja sebagai buruh rokok lalu lalang di rumahnya. Anak-anak kecil juga bermain di sekitar rumahnya, menambah ramai siang itu. Rumahnya berada di Desa Hongosoco, Jekulo, Kudus, berdekatan dengan sawah membuat suasana mengesankan pedesaan.

Saya lahir di Kudus, 3 Januari 1963. Saya bekerja sebagai buruh rokok di perusahaan rokok Djarum. Saya berangkat pagi dan pulang siang, bahkan sampai sore kalau rokok sedang ramai. Jika sudah pulang, urusan rumah seperti memasak, bersih-bersih rumah dan lainnya, saya yang mengerjakannya, meskipun hari Minggu, kerjaan rumah tidak pernah libur.

Suami saya juga bekerja di pabrik rokok, tepatnya di pabrik rokok Nojorono sebagai buruh yang tugasnya mengangkut barang.

Tiap pagi saya diantar anak ke pabrik, sedang Suami naik motor sendiri. Soalnya, saya tidak bisa naik motor sendiri. Ada niat untuk belajar, namun saya malu karena sudah tua. Meski begitu suami dan anak-anak saya bisa mengendarinya, sehingga jika saya ingin bepergian saya meminta salah satu dari mereka untuk mengantarnya.

Selama menikah, dalam pengambilan keputusan dengan suami, saya terbuka. Jika ada masalah tentang pengambilan keputusan kita selesaikan bersama secara kekeluargaan. Misalnya dalam keputusan menyekolahkan anak. Awalnya saya menawari anak untuk memilih sekolah, dengan catatan sekolah tersebut baik baginya dan masa depannya, tidak asal sekolah. Setelah itu, saya dan suami berembug. Jika baik, saya dan suami menyetujuinya. Tetapi, jika tidak sesuai, saya memberikan alternatif lain. Pada prinsipnya, jika saya setuju suami setuju, begitu sebaliknya.

Soal anak, kami mempunyai anak tiga. Dalam penentuan jumlahnya, kami tidak terlalu bermasalah yang penting bisa terawat. Sedikit atau banyak kita yang akan menanggungnya.

Dalam perjodohan kami tidak terlalu mengatur, hanya sebatas memberikan pertimbangan, baik atau buruk. Meski anak diberi kebebasan untuk memilih, jika tidak baik bagi anak dan keluarga, saya tidak setuju.

Saya mengikuti kegiatan Muslimat. Biasanya seminggu sekali diadakan pengajian. Saya sangat senang, karena dapat banyak ilmu agama. Keluarga tidak ada yang melarang. Saya mulai aktif kegiatan tersebut setelah anak pertama saya sudah besar.

Kalau masih kecil sulit sekali meluangkan waktu. Masih repot.

Menjelang pemilu presiden kemarin, pengurus pengajian sering mengingatkan untuk tidak golput. Karena golput membahayakan pemilu. Namun, untuk persoalan memilih, pengurus memberikan kebebasan terhadap peserta pengajian.

Suami saya juga selalu memberitahu bahwa saya harus menggunakan hak pilih. Katanya: "dikasih hak ya harus digunakan".

Tidak ada kesan khusus dalam pemilu yang saya ikuti. Kampanye saya juga tidak ikut. Ya, sekadar memilih lalu pulang lagi ke rumah. Toh pemilu tidak ada dampak terhadap hidup saya. Saya kan *wong cilik* yang tidak ada dampak langsung yang saya terima. Tidak akan ada perbaikan langsung terhadap pekerjaan saya. Saya tetap bekerja seperti biasa. Bagi saya, bekerja atau tidak, tidak ada hubungannya dengan pemilu. Intinya, jika saya tidak bekerja tidak ada perbaikan nasib.

Menurut saya pergantian pemerintahan mulai dari zaman Soeharto hingga sekarang sama saja. Saya tidak merasakan perubahan berarti dalam hidup. Prinsip saya, kalau tidak bekerja, tidak dapat hidup. Meskipun begitu saya tetap

datang untuk memilih, meskipun tidak mendapat amplop.

Di sini ketika pemilihan anggota legislatif 2009 ada yang membagi-bagikan uang. Saya ditawari, di rumah dan di pabrik. Saya terima saja, karena itu merupakan pemberian. Masak diberi, tidak diterima! Tetapi itu tidak mempengaruhi pilihan saya. Saya biasanya memilih calon yang bisa mengayomi, orang yang berwibawa dan tidak neko-neko.

D. Perempuan Pesisir

“Tentang pemilu, saya tidak terlalu paham. Yang saya pahami, jika ada pemilu, saya harus memilih. Saya selalu menggunakan hak pilih”

Bau amis laut begitu menyengat di lokasi pengolahan ikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bajo Mulyo Kecamatan Juwono, Pati. Tampak ratusan ibu-ibu berjilbab duduk berjajar dengan tumpukan ikan di depannya. Sambil ngobrol kesana-kemari disertai gelak tawa, tangan mereka tidak pernah berhenti memisahkan daging dari durinya. Usia mereka rata-rata di atas 40 tahun. Ke atas serta mayoritas memakai jilbab. Bu Wt, salah satu dari mereka yang bersedia kami ganggu di sela-sela mereka bekerja.

Nama saya Wt, umur 54 tahun, saya sudah bekerja di sini 10 tahun. Sebelumnya saya hanya ibu rumah tangga biasa. Karena anak saya sudah besar dan bisa ditinggal maka saya bekerja. Daripada di rumah bengong lebih baik disini bisa kumpul2 dengan yang lain dan dapat uang.

Anak saya dua, yang pertama sudah menikah bahkan saya sudah punya cucu. Anak yang kedua kelas enam SD. Saya bekerja dari pagi jam 06.00 sampai jam 16.00 sore kadang juga sampai jam delapan malam, tergantung banyak sedikitnya ikan. Kalau ikan banyak ya lumayan. Sehari bisa 100kg. 1 kilo nya dibayar Rp. 1000,- jadi sehari saya bisa mendapat uang Rp. 100.000,-. Penghasilan ini cukup membantu kebutuhan saya dan keluarga. Apalagi penghasilan suami tidak menentu. Kalau dapat ikan banyak pulang bawa uang sampai 2juta, tapi kalau angin barat paling pulang bawa uang Rp. 500.000. tergantung tengkulak juga. Kalau harga ikan tinggi ya bersyukur tapi kalau tidak ya kecewa. Padahal ke lautnya sampai sebulan bahkan lebih.

Selama ditinggal melaut oleh suami otomatis pekerjaan rumah saya yang mengerjakannya. Mulai mencuci, masak, merawat anak, nyumbang, menengok orang sakit, bahkan rapat di desa.

Sedihnya itu kalau anak sakit, saya harus pontang-panting sendiri ke dokter. Tapi gimana lagi yang penting semua selamat.

Tentang pemilu, saya tidak terlalu paham. Yang saya pahami, jika ada pemilu, saya harus memilih. Saya selalu menggunakan hak pilih, meskipun tidak diberi uang. Dan dari dulu saya selalu memilih partainya bu Mega. Saya juga selalu ikut kampanye dan *arak-arakan* partainya Bu Mega. Pokoknya keluarga saya dan keluarga lain di daerah sini pendukung berat Bu Mega. Bu Mega itu peduli *wong cilik* dan peduli nasib perempuan.

Memang, kemarin saat pemilu legislatif ada yang memberi uang. Sekarang zamannya memang sudah seperti itu, mulai dari pemilihan lurah sampai presiden, pasti ada. Saya tidak menolak kalau dikasih. Biasanya nominal uang yang diberikan 10 ribu. Tetapi saya tetap pilih Bu Mega.

E. Perempuan Pembuat Kue

"Jika saya dikasih uang untuk memilih saya terima. Menurut saya itu rezeki. Tetapi saya tetap punya nurani. Dan akan memilih yang sesuai dengan hati saya"

Malam hari di rumah Ibu AT (52), suasana terasa ramai. Karena sedang sibuk mempersiapkan pesanan catering. Konsentrasi wawancara agak terganggu dan berjalan sebentar. Karena ia harus pergi untuk membeli kebutuhan cateringnya.

Janda anak satu ini, harus menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya, setelah pisah dengan suaminya. Awal memulai usaha catering memang terasa berat, tetapi ketegarannya membuatnya tabah menghadapi cobaan demi cobaan dalam menggeluti usaha.

Dalam menyambut pemilu presiden ini, saya akan memilih SBY. Alasan utama saya, karena sudah

pernah menjadi presiden. Dan jika akan terpilih lagi, keadaan bisa diperbaiki. Meskipun sekarang bahan-bahan harganya selalu naik, saya tetap berharap di masa mendatang akan diperbaiki lagi.

Soal amplop di sini juga ada, tetapi saya tidak pernah mendapat. Barangkali letak rumah saya yang ada dibelakang atau tertutupi oleh rumah tetangga. Jika saya dikasih uang untuk memlilih saya terima. Menurut saya itu rezeki. Tetapi saya tetap punya nurani. Dan akan memilih yang sesuai dengan hati saya.

Pemimpin yang sesuai dengan nurani saya adalah yang mau mencurahkan seluruh jiwa dan raga untuk mengabdikan kepada rakyat. Mempunyai program untuk rakyat kecil yang jelas, tidak memberatkan. Misalnya soal harga bahan pokok tadi. Semoga bisa diperbaiki. Kita sebagai rakyat kecil hanya bsia berharap, semua bahan kebutuhan bisa turun.

Selain membuat pesanan kue, saya juga ikut PKK. Kalau dulu saya pernah mengikuti organisasi keagamaan, Fatayat NU. Tetapi, sekarang sudah jarang. Kesibukan saya bertambah setelah katering ini banyak pesanan. Sehingga saya harus mengorbankan yang lain, untuk memenuhi pesanan-pesanan ini. Saya bersyukur pekerjaan ini dapat menghidupi saya sekeluarga.

F. PNS Perempuan

“Memilih calon adalah seperti berinvestasi. Jika investasinya itu mempunyai bobot yang baik, nantinya buahnya pun baik. Begitu sebaliknya. Apa yang kita rasakan ke depan, adalah hasil dari masa lalu yang kita tanam”

Kantor di lingkungan yang ditempati DS (46) bertugas sebagai pegawai negeri sipil, terlihat masih dalam masa perbaikan. Sehingga membuat seluruh staf menempati bangunan yang terbatas. Akibatnya suasana kantor ramai sekali. Karena jarak antara satu bagian kerja dengan lainnya berdekatan.

Saya lahir di Semarang, 3 Juli 1968. Saya sebagai PNS yang menjabat Camat Gebog, Kudus. Di luar pekerjaan saya, hanya ikut PKK. Meski begitu, sebisa mungkin jika ada waktu kosong, saya dan keluarga bertamasya.

Dalam persoalan kerja, saya dan suami yang kebetulan juga sebagai PNS di Kabupaten, berkomitmen untuk tidak membawanya ke rumah. Urusan kerja ya kerja, rumah ya rumah. Meskipun begitu kami sering *sharing* dalam pengambilan keputusan, misalnya tentang pilihan politik. Yang jelas saya sekeluarga tidak tergoda akan politik uang. Tetapi, tidak ada yang berani menawari saya amplop lho. Barangkali mereka sudah tahu kalau saya seorang PNS yang bisa saja melaporkannya. Jika toh ditawari, saya akan menolaknya. Cara-cara seperti itu tidaklah etis karena mengajarkan kepada rakyat untuk bersikap pragmatis.

Saya punya prinsip sendiri. Memilih calon adalah seperti berinvestasi. Jika investasinya itu mempunyai bobot yang baik, nantinya buahnya pun baik. Begitu sebaliknya. Apa yang kita rasakan ke depan, adalah hasil dari masa lalu yang kita tanam.

Sekarang enak, PNS diberikan kebebasan memilih, berbeda pada zaman Soeharto dulu, PNS tidak boleh membelot dari partai yang diusung pemerintah yang berkuasa waktu itu. Sehingga mau tidak mau, saya harus memilih partai yang didukung oleh pemerintah, kalau tidak bisa saja, saja dipecat atau dijatuhi sangsi, atas ketidaktaatan saya.

Era berikutnya hingga sekarang tidak ada tekanan seperti zaman Soerharto. Demokrasi sudah dijunjung tinggi, sehingga perbedaan pendapat dan pilihan dalam pemilu sah-sah saja.

Dalam penyelenggaraan pemilu, saya pernah aktif di kepanitiaan, sebagai sekretariat PPK, bagian divisi penyelenggaraan. Itu ketika era Soeharto. Setelah itu saya, tidak ikut lagi dikepanitian pemilu. Sekarang fungsinya tidak dikepanitiaan, tetapi membantu menyukseskan pemilu dengan peran saya sebagai Camat.

G. Perempuan Pedagang Malam

“Pemilu presiden mendatang tidak ada hubungan langsung dengan saya. Saya cuma rakyat kecil. Yang saya butuhkan hanya program - program yang membawa perubahan hidup saya”

Lalu lalang kendaraan yang melintas di depan warung ibu IS (56) mewarnai perbincangan hangat dengan peneliti. Sesekali Ibu IS harus menghentikan perbincangan karena melayani pelanggan warung nasinya. Ia ditemani oleh seorang 'rewang' yang relatif muda dan kedua anaknya yang begitu gesit membuatkan minuman dan membersihkan piring-piring kotor. Di warung itu beliau juga menjual bubur kacang ijo, sebagai salah satu ciri khas usaha orang madura.

Saya lahir dari keluarga petani di Bangkalan Madura 3 Januari 1953, berdekatan dengan makam KH. Hamid Pasuruan. Kultur perantauan masyarakat Madura yang telah terbentuk membuat saya memberanikan diri mengikutinya. Apalagi semenjak kepergian suami saya untuk selamanya, saya harus menghidupi kedua orang anak saya. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke Jawa sini. Barangkali ada peruntungan nasib.

Mulai merantau di Jawa, sekitar tahun 1990-an. Saat itu situasi dan kondisi masih terasa nyaman untuk berdagang. Maklum, orang perantauan harus bisa hidup dan berhasil. Ya, minimal tidak hidup miskin. Mula-mula saya berdagang sate keliling, tetapi situasi menghendaki lain. Desakan ekonomi yang begitu tinggi membuat saya mencoba jualan nasi. Saya berpikir kalau berjualan nasi dapat untung banyak dari pada jualan sate keliling.

Jualan nasi merupakan aktivitas utama dalam keseharian saya. Sore hari saya mulai buka warung, tutup tengah malam, sekitar pukul 12-an. Otomatis kedua anak saya yang masih kecil – kecil itu ikut saya. Kalau di rumah mereka sendiri. Saya juga khawatir. Kalau di sini mereka bisa belajar di sela-sela mereka membantu saya. Di saat pagi, saya belanja kebutuhan pokok warung nasi saya. Siangnya, saya memasak nasi

dan lainnya hingga sore. Biasanya saya bergantian dengan 'rewang' saya untuk memasak sehingga siang bisa istirahat.

Beginilah pekerjaan saya setiap hari, pulang hingga larut malam hingga saya tidak bisa ikut pengajian seperti ibu-ibu lain. Saya harus memnuhi kebutuhan hidup sendiri. Maklum saya juga menjadi kepala keluarga.

Hidup pada zaman sekarang memang sulit, terutama soal ekonomi. Semua mahal. Ya, kondisinya memang sudah membaik. Tidak ada kerusuhan seperti zaman orde baru. Tapi harga-harga tetap mahal. Meski sudah jualan nasi begitu lama, saya hanya punya sepeda onthel. Kalau mau pergi jauh, saya minta diantar saudara seperantauan. Dari rumah sewaan ke warung, saya menggunakan grobak untuk membawa nasi dan lainnya.

Saya sangat berharap pemilu presiden yang akan diselenggarakan mampu memperbaiki nasib rakyat kecil seperti saya ini. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada rakyat. Setiap kali pemilu saya selalu menggunakan hak pilih saya, meski diperantauan. Saya sekarang sudah terdaftar di sini. Dalam penyelenggaraan pemilu, saya hanya sebagai peserta, tidak pernah menjadi panitia.

Pengalaman yang saya alami di setiap penyelenggaraan pemilu hampir sama. Tidak ada pengalaman khusus. Paling-paling setelah memilih langsung pulang. Saya tidak tertarik dengan keramaian pemilu. Karena saya sudah terlalu sibuk mengurus warung.

Apabila ada orang yang memberikan uang atau barang tertentu agar saya memilih calon tertentu, saya akan menerimanya. Zaman sekarang mencari uang sulit. Jadi, ada rezeki, saya terima. Pada pemilu legislatif kemarin, tetangga-tetangga saya sedikit saja yang didatangi. Barangkali tidak didata oleh tim suksesnya.

Pemilu presiden mendatang tidak ada hubungan langsung dengan saya. Saya cuma rakyat kecil. Yang saya butuhkan hanya program-program yang membawa perubahan hidup saya. Dan sayabsudah punya calon yang akan membawa perubahan itu. Orangnya lincah, tegas dan cepat dalam bertindak.

H. Seorang Bidan

“...saya cenderung tidak setuju dengan pemimpin negara seorang perempuan. Dalam memimpin perempuan belum dapat tegas, perasaan masih dilibatkan dalam mengambil keputusan. Akibatnya, kebijakan yang diambil setengah-setengah, tidak tegas...”

Kediaman Ibu ER yang berada di desa Hadipolo, Kudus terlihat sepi. Hanya ada pembantu yang sedang membersihkan halaman belakang rumah. Di sebelahnya ada klinik pondok bersalin Al Hikmah Raharjo, milik Bidan Ibu ER yang buka 24 jam, setiap saat siap melayani masyarakat.

Saya ini seorang bidan yang tugasnya membantu masyarakat yang sakit atau melahirkan. Selain itu saya mendapat jatah jaga di rumah sakit.

Aktivitas di luar rumah sekarang tidak ada. Sebelumnya saya pernah aktif di PKK, tetapi sekarang sudah non aktif. Karena jadi bidan itu sudah sangat sibuk. Waktu saya banyak tercurah di sana. Sebenarnya ada keinginan aktif lagi, namun lagi-lagi waktu yang membatasinya. Saya harus tunduk dengan jadwal jaga yang telah ditentukan rumah sakit.

Di rumah ada mobil dan motor. Mobil biasanya dipakai oleh suami untuk pergi ke sekolah. Beliau sebagai kepala sekolah. Motor dipakai anak untuk sekolah. Saya bisa naik sepeda motor, tetapi sekarang jarang, karena sudah ada anak yang bisa. Saya cukup diantarkannya. Atau jika suami ada waktu, pergi ke rumah sakit diantarkan beliau.

Ada keinginan bisa menyetir mobil. Tetapi waktunya tidak ada. Jika tidak bisa tidak apa-apa, suami masih bisa. Jadi bisa meminta kepadanya jika hendak bepergian jauh untuk mengantar.

Suami sangat mendukung dan tidak ada halangan dari keluarga, tapi ya itu, waktu saya banyak tersita di situ. Keputusan itu juga berlandaskan dari pengalaman yang saya peroleh dari suami dan kawan-kawannya tentang organisasi.

Jika saya aktif di organisasi dan suami demikian, lalu siapa yang merawat rumah dan anak. Saya khawatir perkembangan anak saya tidak maksimal oleh karena tidak terawat dengan baik. Sejauh yang saya amati, dalam sebuah rumah tangga suami dan istri aktif berorganisasi, anak tidak terawat dan terlantar dalam perkembangannya.

Permasalahan selalu ada dalam rumah tangga, sudah menjadi makanan sehari-hari. Saya tetap bermusyawarah dengan suami, tetapi beliau tetap menjadi imamnya. Keputusan terakhir di tangannya. Tetapi, anak juga mempunyai peran dalam penyelesaian masalah. Misalnya dalam masalah pendidikan.

Saya dan suami tidak memaksakan kehendak kepada anak untuk memilih sekolah, melainkan memberikan kesempatan padanya untuk memilih. Ia sudah dewasa, tentu perlakuannya berbeda. Kita ajak diskusi dan jika pilihannya sudah mantap, suami memberikan pengarahan. Orang tua hanya bisa memberikan pengarahan dan bekal ilmu yang akan didupatkannya di sekolah. Sejak kecil memang sudah kita ajari anak untuk memilih. Orang tua di sini selalu mendukung, selama pilihannya baik.

Pengalaman saya tentang pemilu, pada era Soeharto kata orang banyak mengalami tekanan dan ancaman, tetapi saya tidak merasakannya

secara langsung. Pendapat orang berlainan, yang saya yakini itu. Memang rasanya kita tidak ada masalah apa-apa di permukaan, tetapi setelah kita tahu bahwa hutang pemerintah sangat besar dan korupsi keluarga Soeharto meluas, baru kita mulai merasa adanya penindasan terhadap rakyat. Tapi selama soeharto harga sembakau memang murah.

Saya pernah menjadi panitia pemilihan di desa, yaitu sebagai anggota. Itu terjadi pada masa Soeharto. Setelah itu sampai sekarang, saya tidak pernah lagi menjadi panitia.

Sebetulnya saya cenderung tidak setuju dengan pemimpin negara seorang perempuan. Dalam memimpin perempuan belum dapat tegas, perasaan masih dilibatkan dalam mengambil keputusan. Akibatnya, kebijakan yang diambil setengah-setengah, tidak tegas dan jelas.

Seharusnya sesuai tuntunan pemimpin negara adalah seorang laki-laki. Karena sudah di ada ketetapanannya di dalam Al Qur'an. Laki-laki adalah imam bagi semuanya. Sebetulnya tidak menutupi adanya keterlibatan perempuan dalam memimpin, misalnya dalam organisasi keperempuan, pemimpinnya memang harus perempuan, tetapi dalam urusan negara, tidak bisa, lebih baik laki-laki.

Dampak secara langsung pemilu bagi

pribadi saya tidak ada. Karena pemilu kan untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, jika orang yang saya pilih jadi, saya akan menduduki jabatan strategis tertentu. Itu tidak boleh karena menyalahi tatanan demokrasi. Makna pemilu tersebut saya tidak setuju. Jika ada orang yang berjanji kepada saya mengiming-imingi sesuatu untuk memilihnya, saya tolak. Sikap itu merupakan indikasi dari masa depan pemimpin yang tak sehat. Seharusnya pemimpin itu memikirkan kemaslahatan orang banyak, rakyat atau umat yang dipimpinnya.

Bagi saya politik uang adalah seperti janji. Dalam praktiknya ketika kita ditawari untuk memilih dengan imbalan tertentu, tidak boleh mendua. Artinya menerima satu amplop saja. Karena ketika menerima, kita sebetulnya sudah berakad janji. Saya terima uang Anda dan akan saya pilih calon yang Anda sarankan. Namun, kenyatannya banyak orang yang mendua bahkan berlipat-lipat menerima amplop. Menurut saya, itu adalah perbuatan ingkar janji.

Meski saya memaknai demikian, tidak serta merta saya menerima uang dari siapa saja calon yang berlaga, tetapi saya selektif sesuai dengan apa yang akan saya pilih. Itu adalah komitmen saya dalam persoalan politik uang.

I. Buruh Tani Perempuan

"...pemilu tersebut adalah untuk mencari "bapak". Ibarat keluarga kalau tidak ada bapaknya terus bagaimana. Bisa-bisa "rumah tangga" tidak terurus"

Malam itu suasana di rumah ibu LS sepi. Rumah beliau berada di dekat area persawahan. Hanya suara-suara jangkrik, hewan-hewan malam yang terdengar ramai. Ibu LS yang tinggal bersama anak lelaki dan menantunya yang baru saja melahirkan sedang meninabobokkan cucunya. Ibu LS tinggal di Desa paling selatan di Kabupaten Kudus.

Saya lahir tanggal 10 Maret Tahun 1935. Suami saya sudah meninggal. Anak Saya berjumlah dua orang. Semuanya lelaki. Yang satu sudah berkeluarga dan sudah mempunyai satu anak yang baru berusia 9 hari. Sekarang saya tinggal bersama anak bungsu saya dan menantu saya yang baru melahirkan 9 hari yang lalu.

Orang desa seperti Saya ini jangan ditanya tentang sekolah. Saya tidak pernah sekolah. Kalau suami Saya sekolahnya sampai MI saja. Biasa, orang desa. Tidak mampu bayarnya. Dari kecil saya sudah disuruh membantu orang tua mencari nafkah untuk bertahan hidup. Jadi Saya tidak pernah sekolah. Tapi Saya bersyukur, anak Saya bisa sekolah sampai lulus MA.

Dan mereka sangat menghormati saya, biasanya kalau akan mengadakan hajatan atau yang lainnya, Saya diajak untuk bermusyawarah oleh suami Saya. Dicari bagaimana baiknya. Kalau ada apa-apa kita selalu *berembuk* bersama. Karena kita juga yang mengatur rumah tangga.

Apa yang semestinya dibutuhkan dalam hajatan atau acara yang lain. Biasanya Saya menyerahkannya kepada suami Saya. Tapi, suami saya juga meminta pertimbangan dari Saya. Mana yang kurang dari acara yang akan kami adakan.

Saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengajian. Kalau ada kerja bakti, biasanya saya ikut langsung. Tetapi terkadang Saya menyuruh anak Saya untuk mewakilinya karena mungkin terbentur dengan kesibukan Saya sendiri. Kalau tidak ikut ya tidak enak sama tetangga dan orang-orang. Biasanya Saya juga ikut menata jalan. Seperti yang terlihat, jalan disini itu masih jelek, jadi kalau ada penataan jalan biasanya warga disini bersama-sama menatanya.

Kegiatan saya kalau musim tanam ya tander (menanam padi), menggarap sawah. Ya melakukan aktivitas petani. Itu saja. Karena Saya tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, kami bergantung kepada hasil tanah (panen). Kalau musim kemarau seperti ini lumayan bingung, karena sawah sulit untuk digarap. Hidup di desa ini itu sulit.

Makanya dengan adanya pemilu saya berharap akan ada pemimpin mau memperhatikan petani, dan memperhatikan anak-anak besok.

Saya berharap sekolah bisa gratis supaya orang seperti saya ini bisa menyekolahkan anak cucu kami. Karena selama Saya merasa berat membiayai anak Saya untuk sekolah sampai ke

jenjang yang lebih tinggi. Disamping itu, Saya ingin rakyat kecil diberi sumbangan beras seperti sekarang ini. Karena hal ini sangat membantu "wong cilik" terutama keluarga Saya.

Kalau bagi saya, pemilu sangat penting. Karena pemilu tersebut adalah untuk mencari "bapak". Ibarat keluarga kalau tidak ada bapaknya terus bagaimana. Bisa-bisa "rumah tangga" tidak terurus.

Saya sangat senang dengan calon presiden yang peduli terhadap petani. Karena mempunyai program yang jelas terhadap petani dan buruh. Di pemilu mendatang, saya akan memilihnya.

J. Seorang Tukang parkir Perempuan

“Pilpres ini saya tidak nyontreng. Sebab tidak ada waktunya, masih kerja di pasar. Pagi sudah berangkat kerja, ketika pulang TPS sudah tutup. Presiden siapa saja kelihatannya sama, tidak ada bedanya”

Pagi itu, 8 Juli 2009, di depan pasar Bulumanis, Margoyoso, Pati, seorang perempuan tua, sibuk mondar-mandir di depan parkiran motor. Perempuan itu, Am (50), sejak pagi sudah nongkrong di depan kios-kios yang berjajar untuk menata motor pengunjung pasar. Pakaian seragam kuning khas tukang parkir sudah mulai kusam, namun itu baju “kebesaran” yang dimilikinya. Baju itu setiap hari menenami dirinya, bekerja menata motor di depan pasar.

Dengan cekatan, Am mempersilakan pengunjung pasar untuk menaruh sepeda motornya di wilayah parkir yang menjadi miliknya. Ruang itu, memanjang sekitar 15 meter. Area parkir pasar Bulumanis, memang tak hanya menjadi bagian wilayahnya. Am harus berbagi dengan tiga rekannya yang lain, yang semuanya laki-laki. Kebetulan, Ambarwati mendapatkan wilayah yang ramai, di depan pasar, meski dengan area sempit. Sebagai satu-satunya perempuan, Am tak merasa terkucil. Justru, banyak ibu-ibu yang menjadi langganan di area parkirnya.

"Saya sudah sepuluh tahun bekerja sebagai tukang parkir", ungkap Am. Selama sepuluh tahun, Am harus berjuang berlindung dari panas dan hujan. Dari raut mukanya, Am patut dibilang sebagai nenek. Namun, menurut pengakuannya, sebagai perempuan, dia hanya bisa pasrah dengan nasib keluarganya. Sebelum menjadi tukang parkir, Ambarwati bekerja serabutan dengan menjadi buruh tani dan tukang kebersihan di rumah tetangganya. Tak jarang, karena lelah, dia tak bisa bekerja. Naasnya, karena hidup miskin, Am ditinggal suaminya selama beberapa tahun. Suaminya bekerja ke luar kota, namun tak pernah kembali. Ambar hanya ditemani anak perempuannya yang sebentar lagi memberinya

cucu. Menantunya mengisi hari dengan bekerja sebagai buruh tambak di desanya, daerah pesisir kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Meski, hidup sederhana, Am bersyukur karena masih ada anak yang membantu dan menemani hidupnya di usia senja.

Setiap pagi, selepas subuh, Am harus mempersiapkan seluruh kebutuhan rumah tangga, untuk memasak dan mencuci baju. Kegiatan ini dilakukan agar dirinya selalu semangat mengisi hari. "Memasak dan membersihkan rumah itu kegiatan saya di pagi hari, jadi saya menikmatinya," ungkap Am

Setelah membersihkan rumah, Am berangkat kerja dengan menumpang bus angkutan desa, menuju pasar Bulumanis, 13 km dari rumahnya. Setiap hari, perempuan ini harus bangun lebih pagi, agar pekerjaan dan kehidupan rumah tak terbengkelai. Di pasar Bulumanis, langganan Am lumayan banyak. Dia cepat akrab dengan pengunjung pasar yang ingin membeli dagangan. Setiap hari, ia menata sepeda motor dengan cekatan. Setiap motor yang parkir di areanya, oleh pemiliknya, Am diberi upah 500 rupiah. Tak jarang, nenek ini diberi uang lebih oleh langganannya. Setiap hari, Am bisa membawa uang yang menjadi penghasilannya, sekitar 15 -25 ribu, tergantung

dari ramai sepi-pasar tempat mangkalnya. Am khidmat menjalani profesi sebagai tukang parkir sampai pukul 13.00 WIB. Ketika pasar sudah mulai sepi, Am pulang ke rumahnya untuk menangani pekerjaan rumah. Pekerjaan sebagai tukang cuci di rumah tetangga, masih menunggu dirinya.

Ya, Am merupakan potret perempuan dengan semangat baja untuk terus hidup dan mengisi kehidupan dengan semangat. "Saya ingin hidup sehat, agar saya bisa bahagia. Saya bekerja agar kebutuhan pribadi tercukupi, dan tidak merepotkan menantu. Terkadang, tabungan saya juga dipakai anak untuk memperbaiki rumah," ungkap Am.

Dalam urusan politik, Am mengaku tidak banyak mengerti. Dia jarang mengikuti berita di televisi. "Kulo niki mboten mudeng berita politik. Sing kulo senengi mung sinetron, wayah ndalu (Saya ini tidak paham berita politik, yang saya sukai itu sinetron, ketika malam)," aku Am.

Kulo sejatine mboten mudeng politik, pilpres ugi mboten mudeng. Kulo namung paham partai, mergi tonggo wonten ingkang nyalon dados anggota dewan. (saya sebenarnya tidak paham politik, pilpres juga tidak paham. Saya hanya paham partai, karena tetangga ada yang menjadi calon anggota dewan).

Pilpres niki kulo mboten nyoblos, eh nyontreng.

Mergi mboten wonten wekdale, taksih merdamel teng pasar. Injing sampun brangkat merdamel, pas mantuk TPS sampun tutup. Lha nggeh mpun, mboten nyontreng (Pilpres ini saya tidak nyoblos, eh nyontreng. Sebab tidak ada waktunya, masih kerja di pasar. Pagi sudah berangkat kerja, ketika pulang TPS sudah tutup. Ya sudah, tidak jadi nyontreng).

Presiden sinten mawon kadose sami, mboten wonten bedane. Namung, tahun niki kulo angsal BLT, dados luwih seneng. Nanging, merdamel kulo nggeh sami, malah blonjo langkung larang sak niki. Benten kaleh mbiyen, nopo mawon murah. Sak niki langkung larang, mboten kiyat tumbas ingkang enak-enak. (Presiden siapa saja kelihatannya sama, tidak ada bedanya. Akan tetapi, tahun ini saya dapat bantuan BLT, jadi agak senang. Akan tetapi, kerja saya juga sama, malahan biaya belanja lebih mahal sekarang ini. Beda dengan dulu, apa saja murah. Sekarang ini lebih mahal, tidak mampu beli yang enak-enak).

Am merupakan potret perempuan yang gigih memperjuangkan hidup. Baginya, bekerja tekun merupakan aktifitas yang menyenangkan. Walaupun sering didera pusing dan gangguan penyakit lain, akan tetapi dirinya akan terus bekerja. Ini menjadi falsafah diri, untuk menyelesaikan kebutuhan pribadi, tanpa harus tergantung pada orang lain.[]

K. Perempuan Pembuat Batu Bata

"Saya hanya lulusan SD, jadi ndak terlalu mengerti persoalan politik. Itu kan urusannya laki-laki"

Hamparan batu bata yang masih basah memanjang di belakang bedheng, di dekat ruang pembakaran. La (47) perempuan pembuat batu bata, terlihat sibuk menata cetakan batu bata. Siang yang terik memacu dirinya untuk bekerja lebih cepat, agar batu-bata yang tercetak lebih banyak. Panasnya matahari yang menyegat cocok untuk mengeringkan batu-bata, hingga siap dibakar.

Di pinggir sawah, di desa Karangwage, Trangkil, Pati, La setiap hari melakoni aktifitas rutin sebagai pengrajin batu bata. Ketika musim kemarau seperti sekarang ini, sebagian besar waktu hidupnya dihabiskan untuk berakrab dengan tanah

liat, bahan baku batu bata. Perempuan ini terlihat sangat trampil melumat tanah, agar halus dan liat. Lasi ditemani suami dan dua keponakannya, dengan pekerjaan yang berbeda. Suaminya lebih banyak mengurus proses jual-beli batubata, mengantar hasil produksi ke pemesan, serta membeli tanah merah sebagai bahan baku. Praktis, seluruh manajerial kerajinan batu-bata dipegang oleh suaminya.

Sementara, untuk urusan produksi, La ditemani dua keponakan lelaki. Setiap hari, dari pagi hingga petang, La bekerja di belakang rumahnya, yang ada di pinggir lahan sawah. Di sebelah timur rumahnya, persis di pinggir sawah, terlihat bangunan sederhana, dengan tumpukan batubata yang selesai dibakar. Bangunan itu hanya terdiri dari empat tiang, yang menyangga atap anyaman *blarak*, serupa *welit*. Bangunan sederhana itulah, yang menjadi tumpuan harapan La sekeluarga; tempat pembakaran, sebagai proses terakhir untuk menghasilkan kerajinan batu-bata.

"Saya sudah sejak kecil, bekerja sebagai pengrajin batubata," ungkap La. Usaha ini memang menjadi pekerjaan turun temurun. Kedua orang tua La, dulunya juga bekerja sebagai pengrajin batubata. Setelah meninggal, usaha ini diwariskan kepada anaknya, terutama La, yang memang

cekatan mencetak tanah liat sebagai batubata. Sedangkan, kedua saudara laki-lakinya merantau ke Jakarta, sebagai mandor proyek Bangunan. Pekerjaan sebagai pengrajin batubata inilah yang setiap hari mencukupi kebutuhan hidup La sekeluarga. "Lumayan mas, usaha ini bisa mencukupi kebutuhan pribadi, menyekolahkan dua anak, dan membeli pick-up murah."

Kedua anak La, yang semuanya perempuan, bersekolah di sebuah madrasah, sekitar 7 kilometer dari rumahnya. Kedua anaknya, kelas 1 Aliyah dan kelas 2 MTs. Seringkali, ungkap La, ketika liburan, kedua anaknya juga bekerja membantu dirinya sebagai pengrajin batu-bata.

"Sekarang ini, batubata ndak jelas harganya mas. Kadang-kadang naik, terkadang juga jarang yang membeli. Maklum, sudah banyak yang membuat, persaingan antar tetangga juga semakin keras", ungkap La. Untung, ada kebijakan dari pemerintah desa yang berusaha mengendalikan harga batubata biar memiliki kesamaan dan tidak merusak pasar. Namun, masih juga banyak pengrajin yang lebih senang menjual dengan harga rendah, karena stok barangnya ingin cepat habis. "Kalau lama ndak terjual, saya jadi pusing. Modal ndak bisa berputar. Sementara, perut juga harus selalu makan. Biaya sekolah terus naik", pinta La.

Menurut La, musim batu-bata yang ramai terjual itu ketika panen padi, ketika penduduk di sekitar Pati banyak yang ingin membangun rumah. Jadi, ketika penduduk desa mempunyai uang. Namun, tak jarang, batu bata hasil buatannya juga dibeli oleh tengkulak. "Harga batu bata ndak menentu. Sekarang ini, harganya hanya 230 rupiah setiap batang. Padahal, bahan baku dan biaya pembakaran terus naik. Terkadang, saya ndak untung sama sekali. Hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau ndak disambi ngurus sawah, susah beli sembako", kata La, ketika istirahat di siang yang terik.

Politik itu Bikin Bingung

La merupakan sosok perempuan pekerja yang tak pernah berhenti berakrab dengan tanah liat. Wajahnya menghitam, karena setiap hari bergelut dengan panasnya matahari. Ketika musim hujan, ia harus membangun atap sederhana, agar batubata yang telah dicetak tidak menjadi basah. Ia melakoni hidup sebagai pengrajin batubata dengan ceria, karena merupakan pekerjaan warisan.

Baginya, pekerjaan sebagai pengrajin tak menjadi kendala untuk mengurus pendidikan anaknya. Ia bertekad, anaknya harus belajar terus. Bila perlu, kalau memang ada biaya, ia ingin

menguliahkan anaknya di perguruan tinggi. "Biar anak saya bisa bekerja lebih baik. Pandai bergaul dengan banyak orang. Kan, usaha akan mengikuti sendiri", terang La. Saya selalu percaya pada suami, biarpun memang pekerjaan rumah tangga menumpuk, ketika saya selesai bekerja membuat batubata. Ungkapan Lasi ini menjadi bukti perempuan yang pasrah pada hidup, meski tidak pernah menyerah dengan kekurangan. "Terkadang, kalau susah menjual batubata, saya hutang pada tetangga", ungkap La.

Ketika ditanya tentang urusan politik, Lasi mengaku hanya sedikit mengerti. "Saya hanya lulusan SD, jadi ndak terlalu mengerti persoalan politik. Itu kan urusannya laki-laki. Jadi, saya ndak ambil pusing. Kalau nyontreng, saya tinggal tanya suami", terang La.

Saya ndak terlalu banyak ngerti politik. Hanya dengar sedikit di televisi, itu pun saya ndak ngerti. Politik itu membingungkan. Kan banyak anggota DPR yang ngakunya baik, tapi malah dipenjara. Ini kan membingungkan. Calon presiden kemarin juga sama kok. Ndak ngerti ah..

Lha wong saya ndak tahu sifat beliau. Saya hanya sedikit tahu nama-namanya. Kan banyak tetangga yang pakai kaos calon presiden, ketika kampanye. Saya ngertinya cuma itu. Kalau pas

debat di televisi, saya kan ndak mudheng. Itu bahasanya terlalu tinggi. Saya bingung, ndak paham. Kalau presiden yang saya inginkan, ya ngerti nasib rakyat kecil. Terutama yang punya program pendidikan gratis. Tapi kan, pendidikan gratis membingungkan. buktinya, sekolah masih mbayar. Biarpun saya hanya lulusan SD, tapi saya ingin anak saya bisa pintar. Biar hidupnya enak..

Setiap hari, La masih terus bergelut dengan lumpur. Dia tak pernah terasa lelah bekerja. Baginya, tanah liat adalah teman paling akrab yang setiap hari bergaul dengan dirinya. Potret perempuan pekerja yang tak pernah berhenti memikirkan pendidikan dan nasib anaknya[].

L. Seorang Dalang Perempuan

"...pemerintah seharusnya mendukung penuh perkembangan kesenian dan kebudayaan di daerah.

Seniman selayaknya diperhatikan, karena akan meningkatkan citra daerah"

Sebuah kotak besar teronggok di pojok ruang tamu. Kotak ini berisi dua buah wayang kulit, dan beberapa wayang kardus. Di sebelahnya, ada besi pengait jemuran dan kain membentang, yang difungsikan sebagai geber pertunjukan. Dengan peralatan sederhana inilah, hampir setiap hari, SP (32) berlatih menjadi dalang.

Tidak terlalu sulit untuk menemui dalang perempuan ini. Rumahnya terletak di depan jalan lingkar, di desa Panjunan, kecamatan Kota, yang biasa dilewati truk besar dari Surabaya-Semarang yang melintas di kota Pati. Di samping rumahnya,

terdapat bengkel cat yang penuh sesak dengan mobil bekas. Rumahnya tak terlalu besar—untuk tak mengatakan sempit—yang dihuni enam orang; ia, ibunya, saudara dan beberapa keponakan. Namun, ruangan sempit tak menghalanginya belajar menjadi dalang profesional.

Mbak SP—sapaan akrabnya—mulai bergelut dengan wayang sekitar 4 tahun lalu. Ketika itu, ia diajak seorang teman lelaki, untuk berlatih di Pepadi (Persatuan Pedalangan Indonesia) Pati. Sanggar Pepadi terletak di pinggiran kota Pati. Di tempat inilah, SP memulai berkenalan dengan dunia wayang.

Dunia imajiner wayang kulit suntuik digeluti SP. Saking senangnya, ia tekun belajar dengan banyak guru di sekitar Pati. "Saya punya banyak guru, yang mengajari beberapa hal spesifik", ungkap SP, yang mengaku lulusan SMA.

SP mengaku, dalam empat hari selama seminggu, ia belajar dengan empat guru yang berbeda. Ia belajar model sabetan wayang dengan Pak Witono (tokoh Pepadi Pati) dan Pak Muharso, belajar *suluk* dengan Pak Sunaryo, memperdalam keahlian bercerita pewayangan dengan mengaji pada Pak Ngatawi. Selain itu, ia rajin belajar di sanggar Pepadi dengan menggelar latihan bersama kawan-kawannya sesama dalang muda.

"Saya terhitung masih sangat muda dalam dunia pedalangan. Empat tahun itu waktu yang sangat pendek. Saya masih harus banyak berlatih dan meningkatkan jam terbang. Namun, saya tak menolak ketika ditanggap pentas. Justru, pentas akan menambah ketrampilan tangan dan olah suara saya", ungkap SP yang lahir pada 27 November 1977.

Menurutnya, ketika sudah terjun di dunia seni, terutama pedalangan dan dunia wayang, harus ada kebulatan tekad untuk menjadi profesional. "Tapi mendalang bukan untuk uang. Yang penting kesungguhan belajar. Kalau kita bisa menjadi dalang yang bagus, nanti urusan uang akan mengikuti," tegasnya.

SP, merupakan satu-satunya dalang perempuan di Pati, yang masih bertahan dan rajin mengikuti kegiatan kesenian. "Menurut cerita beberapa teman sesama dalang, dulu memang ada beberapa dalang perempuan. Tapi, sekarang sudah pensiun, jarang sekali tampil di depan publik", ungkapnya. Mbak SP mengaku, ia memang sudah bisa mementaskan beberapa cerita, tapi masih sangat terbatas pada cerita yang jadi pakem. "Saya memang sudah menguasai beberapa cerita, semisal Srikandi, Mustokoweni, Wahyumakutoromo, Mustokoromo dan beberapa cerita lain. Tapi, saya akan terus berlatih mengembangkan cerita, agar

penonton terhibur dan senang dengan kesenian wayang," tandasnya.

Dalang perempuan asal Pati ini, juga sering mengikuti beberapa lomba yang diselenggarakan di tingkat daerah maupun nasional. SP mengaku, ia mendapat penghargaan pada Festival Dalang Wanita 2008, sebagai dalang dengan Respon Penonton Terbaik, Juara III Lomba Dalang, Hari Juang Kartini, di Kodim Pati, 2007.

SP mengaku, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia menjadi pedagang kaus kaki dan pakaian dalam di Pasar Puri, Pati. "Kalau menggantungkan dari mendalang, kan jarang pentas. Saya masih harus banyak belajar. Kalau ndak bekerja, makan dari mana?" ungkapnyanya.

Meski harus membanting tulang, ia mendapat dukungan dan semangat dari keluarga. Menurutnya, karena bisa meyakinkan masa depan sebagai dalang perempuan, keluarganya bisa menerima dan mendukung penuh. Ia juga tak merasa rendah diri, ketika harus bekerja pontang-panting di siang hari. Sementara, malam harinya sering berlatih mendalang di sanggar maupun di rumah sendiri, dengan peralatan terbatas.

Politik Harus Mendukung Kesenian

SP merupakan tipikal dalang perempuan

yang setia dengan jalan hidup sebagai seniman, meski penuh perjuangan untuk menyeimbangkan ekonomi keluarga. Menurut SP, harus ada orang yang melestarikan kesenian, karena penting bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, pemerintah seharusnya mendukung penuh perkembangan kesenian dan kebudayaan di daerah. Seniman selayaknya diperhatikan, karena akan meningkatkan citra daerah. "Seniman itu sebenarnya tak cengeng, tapi biarimbang ya harus diperhatikan pemerintah. Sebab, kesenian banyak membantu pemerintah untuk promosi tradisi daerah", ungkapnya.

Mengenai dunia politik, SP mengaku tidak banyak mengerti urusan birokrasi yang njlimet. Ia hanya ingin pemimpin yang mengerti kerja keras seniman dalam nguri-nguri tradisi. "Saya hanya ingin, pemimpin di negeri ini, mengerti dan peduli kesenian. Walaupun tak mintasecara langsung, sudah seharusnya seniman diperhatikan", tandasnya.

Saya mengikuti sedikit pilpres kemarin. Saya sedikit tahu profil capres-cawapres dari berita televisi. Kan banyak disiarkan perkembangan dan janji politik dari capres. Debat capres-cawapres, saya juga mengikuti. Saya kira, ini penting bagi masyarakat Indonesia, agar mengerti siapa calon yang layak jadi pemimpin.

Terus terang saja, saya kemarin memilih pemimpin yang mengerti rakyat. Terutama pedagang kecil dan seniman seperti saya ini. Tapi saya muak dengan janji-janji saja. Saya ingin pemimpin yang tegas dan cepat menyelesaikan masalah negara, tapi juga berwibawa di hadapan rakyatnya.

Bagaimana ya, saya kira soal politik uang sebenarnya saya ndak terlalu mudheng. Tapi saya ndak suka dengan hal ini. Bapak-bapak yang di atas itu justru memulai, kan banyak dari mereka yang memberikan uang ketika kampanye. Di pilkada juga demikian, malahan di pemilihan partai kemarin malah banyak sekali, karena kan banyak calon dewan di daerah ini.

Saya inginnya, pemimpin yang bicara tegas, karena sekarang susah cari orang tegas dan jujur. Kebanyakan banyak yang ngapusi, membohongi rakyat kecil, seperti saya ini.

Bagi SP, hidup sebagai dalang itu memiliki kenikmatan tersendiri. "Seniman itu hidupnya damai, semangat dan ndak banyak musuh. Beda kan dengan orang politik?", akunya. Mbak SP menilai, kehidupan sebagai seniman adalah jalan hidupnya yang akan dilakoni sepanjang umur. "Saya sudah meyakini diri sebagai dalang, maka saya akan terus belajar serius". []

M. Perempuan Samin

"...kalau saya itu, menganggap pemimpin sama saja.

Dulu sampai sekarang ini sepertinya ya sama, tidak ada perubahan. Saya masih hidup, makan dan cukup sandang... adanya pemilu sudah dibahas dengan sedulur sikep lainnya, sebagian yang ngerti ya menonton televisi"

Siang itu, 8 Juli 2009, kampung sedulur sikep terlihat ramai. Ya, hari itu, seluruh penduduk Indonesia mengikuti pemilihan presiden. Tak terkecuali dengan penduduk Samin, di Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sedulur sikep juga terlihat antusias untuk mengikuti momentum pilpres dengan khidmat. Pada sekitar pukul 11.00 WIB, sudah hampir 85 persen sedulur sikep yang mencontreng untuk memilih calon presiden-wakil presiden.

Bertempat di kediaman tokoh sedulur sikep, ratusan penduduk Bombong hilir mudik untuk mencontreng. Di siang yang terik itu, beberapa tokoh sedulur sikep terlihat berjajar rapi untuk menanti proses penghitungan suara. Pada pemilu kali ini, warga Samin di Pati, baru saja kehilangan tokohnya, Mbah Tarno, yang meninggal akhir Juni 2009.

Di sela kegiatan mencontreng, di TPS Bombong, perempuan Samin juga terlihat bergerombol di pojok ruangan. Mereka duduk di dipan yang disediakan tuan rumah. Perempuan Samin terlihat menanti selesainya prosesi pemilihan umum capres-cawapres di TPS di dekat kediamannya.

Sn, salah satu perempuan sedulur sikep ini menanti dengan wajah penuh tanya. Mbah Sn, demikian warga terbiasa memanggil, memang tak pernah mau menyebut umurnya. Akan tetapi yang pasti, ia pernah menyaksikan peristiwa G 30 S PKI, pada 1965. Mbah Sn juga mengaku telah mengikuti pemilu sejak awal orde baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, ketika itu, penduduk Samin juga telah berpartisipasi, meski tak sebebaskan sekarang.

Warga sedulur Sikep memang menjadi komunitas yang selama ini banyak diperbincangkan.

Terutama, ketika aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Sukolilo, Pati. Beberapa tokoh sedulur Sikep melakukan aksi, untuk menolak perusakan tanah dan lingkungan. Inilah yang menjadikan warga sedulur sikep, banyak diperbincangkan di berbagai forum, diteliti dan diundang untuk sharing dengan beberapa pejabat pemerintahan.

Mbah Sn merupakan salah satu warga sedulur sikep yang menghormati proses pemilihan umum. Ia mengaku, selalu mengikuti pemilu, ketika terdaftar dan berhak memberi pilihan. "Kulo niki nderek pemilu mpun kathah sanget (saya ini ikut pemilu sudah banyak sekali)", ungkap Mbah Suntari. Ditemani beberapa keponakannya, Mbah Suntari menuggui TPS di rumah Mbah Wargono, hingga selesai.

Mbah Suntari mengatakan, pada hari itu ia memang sengaja tak berangkat ke sawah untuk bekerja sebagai petani. "Dinten niki mboten teng saben, mergi nderek pemilu (hari ini tidak ke sawah, karena ikut pemilu)," tandasnya. Memang, banyak warga sedulur sikep yang sengaja libur bekerja di lahan pertanian yang selama ini menjadi gantungan hidup mereka. Di beberapa rumah, di sepanjang jalan masuk dukuh Bombong dan di samping, terlihat ibu-ibu sedang ngobrol dan tidak pergi ke

sawah seperti hari-hari biasa. Mereka menganggap pemilu sebagai hari istimewa, hingga memilih tinggal di rumah, agar dapat berpartisipasi. Meski demikian, ada juga beberapa warga yang memang pergi bekerja ke sawah pada pagi harinya. "Nggeh wonten ingkang teng saben, naning jam sedosonan sampun mantuk maleh teng nggriyo (Ya ada beberapa yang ke sawah, tapi jam 10-an sudah pulang ke rumah lagi)," tukas Mbah Suntari.

Antusiasme warga sedulur sikep, menurut pengakuan Mbah Sn, memang tak bisa dilepaskan dari prinsip hidup mereka. Warga sedulur sikep menolak untuk bergabung menjadi pegawai atau bagian dari pemerintah, tapi sebagai warga Indonesia, mereka tetap berpartisipasi untuk memberikan hak politiknya. "Warga sikep niku mboten wonten ingkang dados pegawai (warga Sedulur Sikep itu tak ada yang menjadi pegawai), tandas Mbah Sn.

Menurut Mbah Sn, pemerintah itu ya harus bekerja menurut langkahnya. Sedangkan sedulur sikep punya wilayah sendiri. Mbah Suntari merasa, selama pergantian pemimpin di Indonesia, tidak banyak yang berubah. Sejak zaman Soekarno, Pak Harto sampai sekarang, sedulur sikep tak mengalami perubahan berarti. Ini dimaksudkan, karena warga sedulur sikep mampu mencukupi kebutuhan

pribadi dari hasil mengolah lahan sendiri. Jadi, tidak terlalu terpaksa pada pemerintahan.

'Pemilu niku sami mawon, kadose mboten wonten bedane (pemilu itu sama saja, sepertinya ndak ada bedanya),' tandas Mbah Sn. Hanya saja, memang pemilu itu harus dilaksanakan. Karena, sudah menjadi program yang jelas dan terarah. "Pemilu niku kan sampun diatur, nggeh mpun dilampahi (pemilu itu kan sudah diatur, ya sudah harus dilaksanakan),' ungkap Mbah Sn.

Pada pemilu 2009 ini, Mbah Sn mengaku tak menjadi golput. Sebab, ia terhitung pemilih awal yang antri mencontreng. *'Sampun, kulo sampun nyontreng ndek injing wau (sudah, saya sudah nyontreng tadi pagi),' tegasnya.*

Kulo niki mboten mudeng politik uang. Yen dunduman duit kulo ngertos, nanging kadose mboten wonten, nek mriki. Pas pemilu partai wingi nggeh kathah ingkang badhe maringi, nanging kulo ajrih. Mboten wanton, mangke nek diarani nyolong duit. Mboten wantun...

(Saya ini tidak mengerti dengan politik uang. Kalau pemberian uang ya saya mengerti, namun saya kira tidak ada, di sini/tempat ini. Pada pemilu partai kemarin ya banyak yang mau memberi, tapi saya takut. Tidak berani, nantu dikira mencuri uang. Tidak berani....).

Nek kulo niku, nganggep pemimpin sami mawon. Mbiyen ngantos sak niki kadose nggeh sami, mboten wonten perubahan. Kulo nggeh teseh urip, mangan lan cekap sandang. Lak nggeh mpun cekap to ngoten iku. Nanging, pemilu niki, kulo milih calon ingkang setri, sami kalihan kulo. (kalau saya itu, menganggap pemimpin sama saja. Dulu sampai sekarang ini sepertinya ya sama, tidak ada perubahan. Saya masih hidup, makan dan cukup sandang. Ya gitu kan sudah cukup kan begitu. Namun, pada pemilu ini, saya milih calon yang perempuan, sama dengan saya)

Nek calon presiden lan wakilipun kulo mboten ngertos sinten niku. Nanging, wontene pemilu sampun dirembag kalihan sedulur sanes ugi, sebagian nggeh ingkang ngertos nggeh ningali tilivisi.

(Kalau calon presiden dan wakilnya saya tidak mengerti siapa itu. Namun, adanya pemilu sudah dibahas dengan sedulur sikep lainnya, sebagian yang ngerti ya menonton televisi).

Mbah Sn merupakan satu dari ratusan perempuan Samin yang tinggal di Sukolilo. Mereka hidup dengan kesederhanaan dan pola asketisme yang jernih. Sedulur sikep memang hidup dengan mengandalkan pertanian, sebagai basis penting ekonomi keluarga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka, tak heran apabila

warga Samin, tak banyak membutuhkan dan memikirkan bantuan dari luar daerahnya. Mereka sudah merasa mampu hidup dengan sederhana, untuk mencukupi pangan, sandang dan kebutuhan lainnya. Mereka hidup dengan kesadaran, dalam berpolitik dan bertanggungjawab [].

N. Seorang Nyai

"...memang tak ada pemimpin yang sungguh sempurna, semuanya punya masa lalu yang ada salahnya, itu manusiawi. Akan tetapi, saya lebih memilih yang punya program islami dan peduli pada pesantren"

Suasana pondok pesantren Ar-Raudlah tampak ramai oleh kerumunan santri yang mendengarkan ceramah dari Kiai. Ya, sore itu, santri-santriwati—yang berada di ruang terpisah—sedang menyimak ulasan kitab dari Sang Kyai. Pesantren Ar-Raudlah, Kajen, Margoyoso, Pati, selainnya pesantren lain, rutin menyelenggarakan sema'an kitab bagi santri mereka.

Namun, tak seperti tempat lain, pesantren ini menerapkan aturan yang sangat berbeda. Pesantren ini nampak demokratis bagi santri yang ikut

mengaji, sebab kiai dan bu nyai mereka, merupakan organisatoris yang terbiasa menggerakkan ormas sosial yang berbasis agama, di Kabupaten Pati. Hj. AN (45)—istri KH. AR—merupakan penggerak perempuan di sebuah lembaga perkumpulan pesantren se-kabupaten. Organisasi ini merupakan dampingan dari Robithoh Ma'ahid Islamiyah (RMI)—lembaga perkumpulan pesantren—yang menangani masalah di seputar dunia pesantren di Pati.

Bagi Hj. AR, dunia pesantren memang tak asing bagi dirinya. Sejak kecil, perempuan kelahiran Jepara, 27 September 1964, ini memang telah menjadi santri yang mondok di beberapa pesantren. Orang tuanya yang juga tokoh agama, menjadikan beliau akrab dengan suasana pesantren serta ilmu-ilmu agama. Setelah lama mengaji di pesantren, ia menikah dengan KH. AR, dan dikaruniai lima orang keturunan, tiga putra dan dua putri. Bersama suaminya, ia mengasuh pesantren Ar-Raudlah, dan membina puluhan santri kalong (santri yang tak bermukim di pondok), yang sering mengaji di pesantrennya.

Selain menerapkan kedisiplinan, namun kemudahan akses dan fasilitas, Hj. AN juga terbuka terhadap ormas dan lembaga pemuda untuk bekerjasama menyelenggarakan kegiatan

positif. Di ponpes Ar-Raudlah, telah ratusan kali terselenggara kegiatan sosial, berkat kerjasama dengan berbagai ormas, LSM dan lembaga lain, yang melibatkan santri serta masyarakat sekitar. Kemudahan akses inilah yang menjadikan santri di pesantren Ar-Raudlah terkesan cekatan ketika menghadapi masalah dan menyelenggarakan kegiatan.

Bagi Hj. AN, berkiprah di organisasi sosial, memang membutuhkan energi lebih. Selain harus jeli membagi waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain, dirinya juga tak boleh mengesampingkan proses pembelajaran di pesantren dan meluangkan waktu untuk mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Namun, berkat dorongan dan motivasi dari orang di sekelilingnya, ia dapat terus eksis membantu dan berkontribusi di organisasi sosial yang digeluti.

Peran kelembagaan yang ia sandang, memang memberinya wawasan dan pengetahuan terhadap ruang sosial, serta politik di ranah lokal. Di ruang organisasi, ia memang menempa diri serta mendapat masukan pengetahuan tentang politik di daerahnya. Pandangan politiknya memang terkesan arif, sebagai cermin pengasuh pesantren, namun tak tertutup, sebab persinggungan komunikasi dan pikiran dengan banyak pihak.

Politik menurut saya itu alat untuk melakukan banyak hal, bisa untuk kebaikan tapi juga dapat mengakibatkan kerugian. Kalau dipandang sebagai alat, politik kan bisa jadi bagian untuk melakoni apapun. Akan tetapi, menurut saya, politik itu harus mendatangkan manfaat, kalau hanya mengakibatkan datangnya mafsadah (kerugian), itu kan malah jadi jebakan yang merugikan. Menjadi politisi yang baik, sebenarnya untuk amal ibadah. Tak lebih, ini yang sebenarnya harus disadari. Sekarang ini, politik kan dianggap sebagai lahan bisnis, karena visi pribadi bukan membantu orang lain, tapi menguntungkan diri sendiri.

Kalau politik hanya untuk mencari keuntungan, tanpa mempedulikan nasib rakyat kecil, ya tak berfungsi sebagai pribadi yang baik. bahkan, kalau hanya egoisme semata, maka tak akan dapat apa-apa. Ini sebenarnya yang saya sayangkan dari banyak politisi.

Menurut saya, berorganisasi juga merupakan aktifitas politik, karena lewat organisasi kita bisa membantu banyak pihak, bisa melakukan kerjasama dengan banyak orang dan membantu masyarakat. Saya memahaminya seperti itu, karena organisasi tak banyak berkisar pada pamrih. Organisasi sosial kan malah memberikan kemudahan bagi

orang lain, dan sebagai pengurus, biasanya tidak berorientasi pada profit, tapi mendapat teman dan relasi yang luas.

Memang, politik sekarang memang telah dipersempit, hanya sebatas pada persoalan pemilihan umum dan masalah yang berkaitan dengan kekuasaan. Kalau urusan politik kenegaraan, saya mengikuti laku Kiai NU, seperti kiai Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah dan beberapa kiai lain. Aktifitas mereka kan banyak bersinggungan dengan politik, tanpa harus terjebak dan terjerumus pada persoalan politik yang sempit. Kiai-kiai tetap bisa berkhidmat pada pesantren, NU dan juga mampu memikirkan negara, untuk memberikan manfaat pada sebanyak-banyaknya masyarakat.

Kalau politik hanya dipersempit ruangnya pada permasalahan pemilihan umum dan hal yang berkaitan dengan kekuasaan, maka yang ada hanya upaya untuk merebut suara rakyat. Ini yang saya kira sebagai mafsadah, politik uang bukan malah memberi manfaat kepada banyak orang, tapi memberi kerugian yang sangat besar.

Kan, kalau dihitung misalkan, gaji jadi anggota dewan itu kan tak mungkin mencukupi kalau sebelum pemilihan menyebarkan banyak uang. Jadi, ya ndak bisa, kurangnya dapat uang

dari mana?. Sebagai orang pesantren, kita kan bisa menghitung dan menimbang sendiri mana kira-kira yang baik dan buruk. Mana yang harus kita perjuangkan, atau mana yang harus ditolak. Itu saya kira, pilihan politik bagi santri, harus berlandaskan moral yang benar. Al-qur'an dan kitab-kitab kan sudah mengajari kita tentang hal itu.

Setiap pemilu, semenjak saya telah memiliki hak untuk menyalurkan pendapat, seingat saya saya berusaha untuk memahami siapa yang hendak saya pilih. Kalau orde baru kan susah untuk memilih, karena memang tidak mengerti siapa yang mau nyalon jadi anggota dewan atau pemimpin lain. Tapi, setelah reformasi, banyak hal yang dapat diperoleh, informasi mudah dan rakyat sudah bisa mengakses sendiri.

Kebebasan informasi setelah reformasi, saya kira yang jadi celah bagi pesantren untuk masuk ikut andil dalam politik. Warga pesantren kan bisa mengerti cara dan alur pemilu, kalau dulu kan susah. Nah, saya lewat organisasi sosial, biasanya membantu sosialisasi, entah kerjasama dengan KPU, atau dengan lembaga lain. Fungsinya, agar santri itu mengerti apa yang dilakukan ketika pemilu, bagaimana pentingnya memberikan aspirasi kepada pemimpin yang dihormati. Jadi, tak sekedar ikut-ikutan.

Biarpun dengan peran terbatas, saya kira sosialisasi ke pesantren penting agar banyak yang mengerti. Itu yang saya lakukan selama ini.

Pendapat saya tentang calon presiden tahun 2009 ini, Saya kira banyak yang hampir sama ya, semuanya berkampanye di berbagai media. Bahkan, pesantren juga sering dikunjungi oleh beberapa tim sukses. Ini sah-sah saja, asalkan tidak membawa *mafsadah* (merusak). Potensi pesantren kan luar biasa, karena banyak santri dan sumber dayanya juga lumayan. Saya melihat, memang tak ada pemimpin yang sungguh sempurna, semuanya punya masa lalu yang ada salahnya, itu manusiawi. Akan tetapi, saya lebih memilih yang punya program islami dan peduli pada pesantren. Kan harus begitu. Ini yang saya tekankan ketika berbicara pada santri dan ketika berjumpa banyak kalangan, dari pengurus dan bu nyai di pesantren-pesantren[[]].

O. Seorang Wartawati

"...politik itu kan sebenarnya ruang untuk membentuk sistem, dan juga dibentuk oleh sistem. Sebagai alur dan cara, politik kan berhak menentukan terbentuknya sistem baru, karena ia juga hasil dari sirkulasi sistem. Ini yang saya pahami, jadi politisi itu kan subyek dalam sistem, yang bisa mengatur sistem itu sendiri, tapi kan ada caranya tersendiri"

Duniatulis-menulis, bagi Sep(23), merupakan hal menarik untuk ditekuni. Semenjak mahasiswa, ia aktif sebagai bagian dari aktifis pers kampus. Sehingga, nalar jurnalistik dan dunia tulis melekat pada dirinya. Jalur inilah yang menyebabkan dirinya memilih sebagai wartawan pada sebuah media massa, di daerahnya, Jepara.

Setiap hari, untuk melaksanakan tugas sebagai wartawan, Septina harus memburu narasumber dari birokrat sampai petani. Ia setiap hari bertemu dengan berbagai pihak yang berbeda. Kebiasaan inilah yang menjadikan Sep, mudah bergaul dan berdiskusi dengan banyak pihak. Kepekaan dalam wawancara serta menulis reportase, menjadikan Sep secara tak langsung, belajar berbagai hal, yang sebelumnya belum didapatkan dari kampus.

Ketika mencari data berita, Sep tak jarang harus menemui politisi sampai kiai. Ketika bertemu dengan politisi, ia dapat belajar dan mengetahui perkembangan terakhir terkait persoalan politik. Sedangkan, ketika sowan ke pesantren, untuk wawancara dengan kiai, ia dapat belajar banyak hal tentang agama dan persoalan di seputar pesantren.

Persinggungan dengan banyak pihak inilah yang menjadikan Sep mengerti persoalan politik dan perkembangan kondisi daerahnya. Ia juga dituntut untuk mengikuti perkembangan berita mutakhir, yang menjadi isu berbagai media. Hal ini memang menjadi tugas sehari-hari, sebagai wartawan.

Tak jarang, kesibukannya sebagai wartawan, menjadikan staminanya terkuras habis. Maklum,

setiap hari ia harus menempuh perjalanan puluhan kilometer dari rumahnya di daerah Kedung, untuk menyisir informasi di seputar kota Jepara dan daerah lainnya. Namun, ia masih tetap bisa membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Meski, terkadang banyak yang tak tertangani, karena harus mengejar informasi dan menyelesaikan tugas dari kantor.

Perkembangan politik mutakhir, memang menjadi menu harian bagi Sep, sebelum mencari berita yang tepat dan menjadi isu terkini. Ia mengikuti berita politik sebagai keharusan, meski akhirnya jadi kebiasaan. Pandangan politiknya memang menarik, karena ia selalu mengikuti perkembangan, bertemu dengan sumber politik, dan membentuk opini publik lewat ulasan yang ia tulis.

Saya sebenarnya bukan berasal dari background politisi, basis akademis saya juga bukan ranah politik. Akan tetapi karena setiap hari bertemu dengan banyak orang, entah itu dari kalangan politisi, kiai, petani dan berbagai profesi lain, saya jadi banyak belajar. Ini yang membuat saya mengerti bagaimana kondisi terakhir yang terjadi di daerah, maupun isu nasional yang ditanggapi oleh politisi daerah.

Menurut saya, politik itu kan sebenarnya ruang untuk membentuk sistem, dan juga dibentuk oleh sistem. Sebagai alur dan cara, politik kan berhak menentukan terbentuknya sistem baru, karena ia juga hasil dari sirkulasi sistem. Ini yang saya pahami, jadi politisi itu kan subyek dalam sistem, yang bisa mengatur sistem itu sendiri, tapi kan ada caranya tersendiri.

Politik di daerah, itu penuh dengan persaingan, baik dari aktor politik maupun dari partai politik yang ada. Ini sudah menjadi hal yang wajar, karena memang yang menjadi orientasi adalah persoalan kekuasaan dan otoritas untuk memerintah. Bukan kesalahan dari daerah, karena ini sistem yang telah berlangsung, kan susah untuk mengganti model ini. Kalau memperbaiki bisa, tapi harus dengan kesadaran dari banyak pihak. Saya juga sering merasa sedih, karena ada beberapa politisi yang tak paham dengan tujuan politik. Bagaimana bisa mendengarkan suara rakyat, kalau tak mengerti tujuan politik yang dijalani, jadi hanya terkesan ikut aturan dan arus. Akan tetapi, banyak juga yang mengerti dan peduli dengan persoalan politik, karena memang latar belakang dan *sense* pribadinya memang pada persoalan politik. Nah, saya kira, anggota dewan memang harus mengerti dan peduli pada persoalan politik, karena mereka

yang menjadi aktor untuk menentukan kebijakan.

Tentang politik uang, Ini memang menjadi masalah yang susah untuk diselesaikan. Satu sisi, kondisi ekonomi memang sedang lesu, banyak warga yang butuh uang, jadi ketika diberi ya langsung diterima, entah siapa yang nanti dipilih. Akan tetapi dari lingkup struktur, juga tak bisa dipotong, karena memang kecenderungannya seperti itu. Uang memang sulit untuk dicegah, karena kekuasaan itu bukan persoalan kalah dan menang. Akan tetapi menang dan menang. Banyak politisi memang tak siap kalah, mereka siapnya menang saja. Jadi, cara apapun ditempuh agar menang persaingan.

Saya kira, lagi-lagi, harus ada upaya untuk memotong ini. Sebenarnya, kalau masyarakat sudah cerdas, nanti juga susah adanya politik uang. Yang penting kan program dan eksekusi programnya baik. masyarakat akan menilai sendiri siapa yang layak jadi pemimpin, dan siapa yang tak layak.

Nah, ini yang menjadi perhatian saya ketika menulis berita. Ketika akan menulis, saya ingin memberi penyadaran kepada rakyat luas, tentang bahaya politik uang. Jadi, bagaimana menghindari ini, meski susah untuk diberantas secara langsung.

Dari pemilu ke pemilu, saya ya melakukan kontribusi dengan memberi penjelasan kepada

warga, lewat tulisan. Ini yang bisa saya lakukan. Memang sih, saya mengikuti pemilu baru beberapa kali, tapi setidaknya untuk tahun 2009 ini, memang yang saya lakukan sebatas itu. Tapi menurut saya, biarpun kecil, tapi ya tetap saya lakukan sebagai penyadaran publik.

Soal calon presiden tahun ini, Saya kira semuanya bagus, karena mereka kan orang-orang pilihan. Ketiga pasangan capres-cawapres kan merupakan pasangan yang terpilih, dari beberapa partai dan elemen masyarakat. Mereka juga punya banyak pengikut, pendukung dan orang-orang pintar di belakangnya. Akan tetapi, kan di Indonesia, pemilihan langsung kan mencari yang paling banyak pemilihnya. Jadi, mau tidak mau ya yang meraih suara paling banyak yang jadi.

Selain faktor citra dan kepemimpinan dari capres-cawapres, saya kira faktor tim sukses di daerah juga penting. Sebab, ini yang menjadi ujung tombak untuk meraih suara di daerah. Kalau tim suksesnya macet, kan juga susah untuk meraih suara banyak. Saya sih pinginnya pemimpin yang mengerti profesi saya, sebagai wartawan dan pemberi informasi kepada masyarakat luas. Jadi, kebebasan informasi dan keberpihakan kepada media, saya kira penting dan menjadi prioritas saya [].

P. Seorang Guru perempuan

"...politik uang itu bentuk keserakahan politisi elit yang sekarang berkuasa, atau yang ingin merebut kekuasaan. Politik uang itu kan yang mengawali politisi, untuk meraih simpati rakyat dengan jalan pintas... Figur yang saya inginkan, ya orangnya berwibawa, mampu berpikir dan bertindak lebih cepat, serta berpihak pada rakyat."

Bagi SM (28), hidup sehari-hari dihabiskan untuk berkhidmat di lembaga pendidikan. Ia, setiap hari bertugas sebagai pengajar di salah satu insitusi pendidikan. Bersama suaminya, ia juga mengurus kegiatan organisasi sosial yang berbasis kultur dan agama. Setiap hari, SM selalu berangkat pagi agar tak telat mengajar. Biarpun jarak rumahnya dengan tempatnya mengajar tak begitu jauh, namun ia selalu berusaha disiplin.

Aktifitas SM, mungkin merupakan potret

guru swasta di Indonesia yang selalu berkeringat namun tak memperoleh hasil memadai. "Niat saya beserta suami memang tak mengejar uang dari mengajar, kami ikhlas mendermakan ilmu kami untuk pendidikan", terang SM. Namun, bagaimanapun jejak keseharian SM tak bisa lepas dari lilitan kebutuhan uang untuk mencukupi keseharian; membeli susu buat anak, infaq kegiatan sosial, sampai cita-cita membangun rumah untuk masa depan. Untuk urusan ini, ia bersama suaminya berusaha tetap tabah untuk mencari nafkah tambahan di luar kegiatan mengajar. Kebetulan, suaminya juga membantu sebuah lembaga ekonomi, sebagai pengurus aktif. Pikiran SM dan suaminya terbelah di ruang pendidikan, dan konsentrasi mengurus pekerjaan sampingan.

Bagaimana dengan gaji sebagai guru? Nasib guru swasta memang selayaknya diperjuangkan. Persoalan sertifikasi, bantuan operasional dan alokasi anggaran pendidikan, belum sepenuhnya merata. "Dana pendidikan memang belum sepenuhnya terbagi rata, biarpun telah ada program sertifikasi, namun belum banyak guru yang meraih standar untuk mengejar program itu. Terkadang, biarpun telah terdaftar, sampai beberapa tahun dananya belum cair", terang SM.

Urusan pendidikan memang berkaitan

dengan sistem politik yang dipraktikkan di negeri ini. Kalau model dan praktiknya bagus, maka sentuhan terhadap warga kecil akan bagus. Inilah yang dikehendaki SM, untuk masa depan negeri ini yang lebih baik.

Menurut saya, politik itu merupakan sebuah cara untuk mencapai sesuatu. Cara memerintah, cara mengorganisir, cara berdiplomasi dan cara yang lain untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, politik itu tak ubahnya sebuah model manajemen untuk memerintah dan mengorganisir sesuatu. Tak hanya dalam level yang paling tinggi, tapi juga merasuk di level rendah seperti keluarga. Karena kita merasa hidup dalam sebuah negara, sebagai warga, apapun tindakan saya merupakan tindakan politis. Ini tak bisa dilepaskan lagi, apapun model kerja yang saya praktikkan, pasti bertujuan politis. Sebab, saya melakukan sesuatu untuk menginginkan apa yang saya cita-citakan. Jadi, cara saya mendapatkan sesuatu ya melalui politik tindakan itu. Perlu dipahami, menurut saya, politik tak hanya milik pemerintah dan politisi, rakyat sipil juga memiliki hak berpolitik dan berpartisipasi sebagai warga negara. Maka kalau ada ucapan politik itu kotor, saya kurang setuju. Karena politik itu adalah cara, yang mewujud lewat aksi, jadi baik dan buruknya tergantung pada yang melakukan

dan pandangan hidup seseorang. Tergantung siapa yang melakukan, *background* moralnya gimana? Ini yang penting menurut saya, jadi tidak bisa langsung dianggap politik itu kotor dan menyesatkan.

Akan tetapi, memang anggapan itu terus berkembang dan cenderung memberi sekat kepada masyarakat agar menjauhi politik. Praktik ini menurut saya, merupakan pembodohan politik bagi warga kecil. Tetangga-tetangga saya banyak yang miskin pengetahuan politik, entah karena minim kemampuan akademis, sosialisasi yang kurang, atau karena menerima anggapan menjerumuskan seperti tadi. Karena banyak yang komentar politik itu kotor, jadi mereka enggan berpolitik. Sehingga, terkesan politik itu memang hanya milik politikus dan birokrat, masyarakat kecil hanya partisipan yang tak punya ruang bicara, sejak dari pikiran, ekspresi, asumsi dan aspirasi mereka disumbat oleh opini yang menyesatkan. Ini saya kira yang paling parah. Kalau mau sistem politik benar, ya kontrol serta pendidikan politik bagi warga kecil diperjelas. Karena ini yang mempengaruhi struktur berfikir dan tindakan warga ketika berada di tengah momen-momen politik.

Ada hal yang harus diwaspadai yaitu tentang politik uang. Saya kira politik uang itu bentuk keserakahan politisi elit yang sekarang

berkuasa, atau yang ingin merebut kekuasaan. Politik uang itu kan yang mengawali politisi, untuk meraih simpati rakyat dengan jalan pintas. Kalau ingin merebut suara dengan kurun waktu pendek, uang yang akan menjawab. Sekarang, kompetisi uang sangat mengerikan. Pemilu 2009 ini, saya kira menjadi cermin betapa aspirasi rakyat kecil sangat murah, karena dapat dibeli dengan uang cash. Karena sudah merasa membeli, ya politisi dengan enaknyanya bilang bahwa dia bisa berbuat apa saja menurut kepentingannya, karena sudah membayar keinginan rakyat lewat uang yang dibagikan. Ini saya dengar dari suami saya yang ngobrol dengan beberapa anggota dewan. Memang ada kecenderungan lingkaran sistem yang sangat tidak sehat. Politisi tak pernah mau mengerti aspirasi rakyat, mereka hanya ingin berkuasa lewat jalan pintas dengan biaya minimal. Kalau sudah begini, Indonesia mau diapain?

Saya ingin menambahkan, bahwa politik uang itu tak sepenuhnya diinginkan oleh rakyat. Banyak tokoh politik yang justru melanggengkan praktik politik uang, tapi dengan ucapan yang membingungkan. Misalnya ada ungkapan, "ambil saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya, pilih saja yang anda suka", atau ungkapan, "terserah siapa yang kasih uang, tapi pilihlah yang dekat dengan

anda", ini saya kira ungkapan yang menjerumuskan alur pikiran rakyat kecil pada hal yang keliru. Kalau sudah begini, politik uang terkesan dilanggengkan. Ini yang membuat saya prihatin.

Memotong alur politik uang sekarang sangat susah, ini bagai buah simalakama; membingungkan sekali. Rakyat seperti saya, sudah merasa bahwa politik uang itu penting karena, sejak dari struktur bawah, seperti pada pilkades, politik uang seakan menjadi bagian wajib. Saya tak tahu, sejak kapan dimulai, tapi yang jelas ini seakan menjadi bagian penting yang harus ada pada pilkades. Untuk memotongnya memang harus pelan-pelan, lewat pendidikan politik yang merata dan konsisten.

Pemilu kali ini, saya kira sangat penting untuk Indonesia mendatang. Figur yang saya inginkan, ya orangnya berwibawa, mampu berpikir dan bertindak lebih cepat, serta berpihak pada rakyat. Ini memang kombinasi dari ketiga pasangan calon, tapi kan tidak mungkin seperti itu.

Saya berharap, tokoh yang jadi secara resmi, mampu melengkapi visinya dengan mengambil dari pasangan lainnya yang lebih baik. Saya kira ini bentuk kearifan politik yang harus dipraktikkan agar tak terjadi rekayasa politik dan rakyat kecil senang dengan figur yang dipilih. Ini pr yang menentukan masa depan politik Indonesia[.]

Q. Perempuan Penanak Nasi

"Politik itu kan miliknya orang-orang besar... Yang saya lakukan ketika ada pemilu, biasanya memang membantu dari ibu-ibu PKK, saya kan hanya membantu, mereka butuh tenaga saya"

Menjadi buruh memang tak pernah terbayang dalam diri Pur (47), sejak kecil. Ia setiap hari bekerja sebagai tenaga penanak nasi di sekitar tempat tinggalnya. Namun, hal ini ternyata kemudian dinikmati Pur sebagai bagian tugas kemanusiaan. Pur menyanggupi undangan tugas menanak nasi dan memasak, ketika ada tetangga punya hajatan besar, seperti mantenan, slametan dan hajatan lain. Dalam sehari, ketika membantu hajatan tetangga, Pur bisa menanak nasi hingga beberapa kuintal beras. Pekerjaan ini, biasanya dilakukan

hingga tiga hari di setiap hajatan. Maklum, ia harus menyediakan konsumsi sejak awal hingga hajatan usai.

Pur menjalani lakon hidup ini, sebagai warisan dari ibunya, yang memang dikenal sebagai penanak nasi kondang di desanya. Mbah Ju_ begitu panggilanya pada saat mudanya terkenal sebagai penanak nasi dan juru masak. Mbah Ju bekerja dengan cekatan, terampil dan menghasilkan kualitas nasi yang tak saja enak, tapi juga harum dan pulen. Keterampilan ini menurun pada Pur, yang memang telah punya merk sebagai penanak nasi cekatan dan berkualitas baik.

Sebagai penanak nasi, memang pendapatan yang diperoleh tak seberapa. Namun bagi Pur, pekerjaan ini telah memberi hasil yang lumayan untuk menopang ekonomi keluarganya. Untuk menyekolahkan dua anaknya, Pur terbantu oleh pekerjaan suaminya sebagai kondektur bus. Namun, terkadang uang yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak, tak mencukupi dari hasil kerja ia dan suaminya. Kalau kondisi ini terjadi, Pur harus cari hutang di sana-sini. Beruntung, pekerjaannya sebagai juru masak, membuat ini luwes berkenalan dan menjalin hubungan baik dengan beberapa tetangga.

Di ruang keluarga, Pur memang lebih

terkesan sebagai penopang ekonomi utama. Ketika tak ada undangan untuk bekerja sebagai juru masak dan penanak nasi, Puri mencari pekerjaan dengan membantu tetangga sebagai buruh tani. Hasil kerja ini memang tak sebanyak yang diperoleh dari menjadi juru penanak nasi, namun ia melakukannya karena tak ada kerjaan, apalagi bagi dirinya yang hanya tamat Sekolah Dasar. Orang tua Pur memang tak mampu membiayai dirinya ketika masih kecil untuk mendapat pendidikan layak. Namun, tak ada alasan bagi Pur untuk tak menyekolahkan kedua anaknya. "Biarpun pontang-panting, saya ingin kedua anak saya bisa bersekolah hingga tinggi. Mereka harapan saya", terang Pur.

Bagaimanapun, Pur mengerti pentingnya pendidikan. Ia terus berjuang agar kedua anaknya bersekolah, dan keluarganya dapat hidup dengan baik. wawasannya tentang pendidikan, memang tak bisa dilepaskan dari perannya sebagai pengurus PKK. Walaupun ia menjadi buruh penanak nasi, namun kecekatan tangannya memang menjadi nilai plus yang disukai oleh tetangga-tetangganya. Sebagai pengurus PKK, ia sedikit mengerti tentang pentingnya pendidikan, tentang politik di lingkup desa, sampai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan ibu-ibu. Wawasan yang sederhana ini ia dapat dari hasil mendengarkan dan membantu

dalam kegiatan-kegiatan di desanya. Ia sosok buruh yang peka jaman dan mau maju untuk membangun masa depan keluarga.

Tentang politik, Saya sebenarnya tak terlalu paham apa itu politik dan bagaimana bentuknya. Yang saya pahami, politik itu ya modelnya seperti pemilihan kepala desa, ini yang saya mengerti. Ketika membantu di kegiatan PKK, saya memang tak banyak bicara, lebih banyak bekerja, dan mendengarkan apa yang ada, sehingga saya dapat memperoleh sedikit-demi sedikit yang disampaikan dalam setiap acara. Saya belajarnya dari itu.

Politik itu kan miliknya orang-orang besar. Kalau saya kan hanya mendengarkan dan melihat dari berita televisi, itupun tak sepenuhnya menarik. Lebih bagus sinetron atau acara lain. Tapi, suami saya memang rajin mengikuti berita dari televisi. Katanya, biar omongannya tak kalah dari orang lain, saya ya belajar dari itu.

Kalau urusan politik seperti pemilu, saya memang tak banyak mengerti. Yang saya lakukan ketika ada pemilu, biasanya memang membantu dari ibu-ibu PKK, saya kan hanya membantu, mereka butuh tenaga saya. Menurut saya, apapun akan saya lakukan, asal halal dan tak merugikan orang lain. Ketika ada pemilu, biasanya saya memang diikutkan untuk membantu. Entah

apa maksudnya, biasanya nama saya diikutkan oleh bu ketua PKK, kan suaminya jadi pengurus juga. Yang saya lakukan ya, hanya jadi penunggu tinta, kan ndak susah itu. Seingat saya, sudah 3 kali saya ikut jadi pengurus ketika ada pemilu. Itupun, setelah saya membantu kegiatan di PKK, yang penting saya membantu, ntar kan biasanya ada yang memperkirakan.

Walaupun jadi pengurus pada pemilu, namun jujur saja, saya ndak mudeng dengan urusan politik. Ketika ada peraturan yang susah, saya yang tanya sama teman-teman, maksudnya gimana. Yang penting, ketika tanda tangan, saya ikut ndak pernah ketinggalan. Ya, biasanya hanya tanda tangan, gimana lagi...

Saya ndak mengerti tentang politik uang, tapi itu kan sogok-menyogok tho? Kalau korupsi seperti yang diberitakan televisi, itu ya ndak boleh. Tapi kalau pas ada pemilu bagi-bagi uang, memang ya banyak yang memberi. Saya tak tahu hukumnya kalau bagi-bagi uang di pemilu, tapi kan banyak yang bilang, terima saja uangnya, jangan pilih orangnya. Saya ya hanya menerima uang, kalau pilihan kan boleh beda tho?. Tapi, kalau di pemilihan kepala desa, saya ndak berani. Sebab itu kan didata, dan kalau dobel pasti ketahuan, ntar ndak baik sama tetangga, saya pakewuh kalo

dibicarakan orang-orang, terkesan moto duiten (rakus uang) ya?

Pada pemilu tahun ini, saya memang pengen presiden yang tahu kondisi orang kecil seperti saya. Saya tahunya ya dari televisi, siapa presiden yang mau maju lagi. Soal politik yang rumit-rumit itu kan urusannya bapak-bapak yang jadi dewan. Yang jelas, saya ndak mau presiden yang sudah pernah jadi, tapi saya pengen ada perbaikan, soalnya nasib saya ndak berubah-berubah. Memang, presiden kemarin bagus dan banyak beri uang pada rakyat, seperti saya. Tapi harus lebih baik, yang saya inginkan. Tapi entahlah, siapapun yang jadi, masak kenal sama saya? Saya ya tetap jadi penanak nasi [].

R. Seorang Pengemis Perempuan

“...kami juga sering diberikan bingkisan-bingkisan, ya tidak enak kalau tidak milih. Tapi kemarin sempat bingung soalnya calon yang kesini banyak, dan memberi bingkisan semua. Akhirnya saya pilih yang paling banyak memberi bingkisan ataupun uang, kalau pemilihan presiden kemarin tidak ada yang memberi bingkisan ataupun uang tapi saya memilih Bu Mega yang kalemdan keibuan”

Siapa pun yang sering melintasi perempatan Matahari Kudus pasti sudah akrab dengan wajah Mak Yh (50an), seorang perempuan dengan dandanan khas seorang peminta-minta yang begitu sigap menghampiri mobil ataupun pengendara motor yang berhenti di saat lampu merah, sambil berucap, “Paring..paring....”.

Menjadi peminta-minta sudah dijalani

Mak Yh sejak puluhan tahun yang lalu. Tempat mangkalnya pindah-pindah, pernah di Menara Kudus, pasar Kliwon, dan lain-lain. Mbah Yh tidak sendirian. Kedua anaknya juga sama, memintaminta, "Dulu sewaktu mereka masih sekolah SD, setiap pulang sekolah, mereka langsung pergi kerja (memintaminta), kalau suami saya beda, jadi pemulung", demikian ungkap Mak Yh. "Hasilnya lumayan, kalau sepi saya bisa mebawa pulang Rp. 25.000,- sehari kalau ramai ya lebih, begitu juga anak saya, dan sekarang kami sudah punya tempat tinggal meskipun di perumahan sosial. Kami juga punya dua motor SUPRA", tutur Mak Yh.

Perumahan sosial Pecinan Hadipolo tersebut merupakan relokasi kampung kumuh warga miskin kota di bantaran sungai Kaligelis Kota Kudus. Atas inisiatif Dinas Sosial Kudus mereka disiapkan perumahan meski sangat sederhana di komplek Pecinan Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, kira-kira 8 Km sebelah Timur kota. Mereka pindah ke komplek Perumahan Sosial Pecinan selama dua tahap; Tahap pertama tahun 1990 dan tahap dua tahun 1993. Syarat kepemilikan adalah dengan menyertakan Kartu Keluarga dan bersedia membayar dengan cicilan ringan setiap hari Rp 900 selama 15 tahun. Kini penghuni Perumahan Sosial Pecinan tersebut terdiri dari 115 rumah dengan jumlah penduduk

kira-kira 500 orang dengan komposisi laki-laki sejumlah 214 orang dan perempuan 300 orang.

Setiap pagi hari, hampir semua warga Perumahan Sosial Pecinan Hadipolo, baik laki-laki maupun perempuan, tua-muda keluar rumah untuk berusaha mengais rezeki, meski dalam bentuk dan wujudnya yang sangat beragam. Kebanyakan mereka adalah sebagai pemulung, pengemis, pengamen, tukang batu dan tukang becak. Jam 04.00 WIB pagi mereka sudah mulai bangun tidur mempersiapkan diri untuk keluar rumah demi sesuap nasi untuk mempertahankan hidup keluarganya. Sekitar jam 16.00-an mereka sudah mulai berdatangan kembali ke rumah. Anak-anak pun tidak ketinggalan, sepulang sekolah mereka langsung pergi ke tempat biasa mangkal, baik sebagai pengemis, maupun pengamen.

Mengingat mereka kebanyakan adalah memang keluarga jalanan (orang-orang pinggiran) yang sebelumnya terpaksa menjalani hidupnya sebagai tunawisma. Maka dalam keseharian mereka seringkali dianggap oleh pihak-pihak tertentu mengotori kota, karena ketika masih kecil terpaksa menjadi anak-anak jalanan, setelah beranjak remaja terpaksa menjadi pengamen, maka ketika sudah berkeluarga mereka terpaksa menghidupi keluarganya dengan bekerja serabutan mulai dari

tukang becak, pertukangan, pengamen, pengemis, tukang semir, hingga sebagai pemulung. Memang tidak bisa dipungkiri mereka hidup dalam kultur yang penuh dengan "kekerasan", karena harus menjalani kehidupannya dengan penuh nestapa dan keprihatinan, sehingga kenakalan juga terkadang tidak bisa terhindarkan seperti minum-minuman keras, pencopetan, hingga tawuran. Bahkan para pemuda seringkali menghiasi dirinya dengan berbagai tato yang menyelimuti tubuhnya.

Maka penduduk pribumi (mayarakat setempat) seringkali memberikan stigma negatif secara menyeluruh kepada siapa saja yang menghuni di Perumahan Sosial Pecinan tersebut. Hal inilah yang membuat warga Perumahan Sosial Pecinan tersebut merasa tidak nyaman. Hal ini diperparah dengan pola komunikasi dengan warga pribumi yang terhambat, karena sudah menganggap "merah" dan "kotor" warga Perumahan Sosial Pecinan tersebut. Bahkan yang lebih parah ketika ada barang-barang yang hilang dari pihak pribumi, selalu saja warga pendatang (pecinan) dicurigai sebagai *maling* (pencurinya), termasuk perempuan atau ibu-ibu yang belanja di pasar pun selalu diawas-awasi dan dipandang sinis oleh warga pribumi. Padahal sejak tinggal di perumahan Sosial Pecinan tersebut mereka berangsur-angsur mulai

menata hidupnya. Bahkan juga pernah ada *jamiyah tahlil* Ibu-ibu yang dilaksanakan secara rutin.

Sekali lagi, itulah derita nestapa yang dialami oleh warga perumahan sosial khususnya perempuannya. padahal, dibalik nestapa sosial kehidupan masyarakat miskin di perumahan sosial Pecinan Hadipolo, sebenarnya terdapat perempuan-perempuan kuat dalam turut berjuang mempertahankan hidupnya. Semangat dan etos kerja yang tinggi dimiliki oleh perempuan dan ibu-ibu warga perumahan sosial. selain sebagai ibu dan istri, yang mengurus urusan rumah tangga, mereka juga mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan banyak juga mereka yang sedang hamil besar pun pergi mengemis di perempatan jalan, menjadi pemulung dan lainnya.

Semangat juga ditunjukkan oleh warga perumahan sosial pada saat pemilu, hal tersebut tampak dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya yang lumayan tinggi, "Pada saat pemilu, disini ramai sekali, biasanya saya ke TPS dulu sebelum berangkat kerja. Gimana ya..kami kan sering didatangi calon, kami juga sering diberikan bingkisan-bingkisan, ya tidak enak kalau tidak milih. Tapi kemarin sempat bingung soalnya calon yang kesini banyak, dan memberi bingkisan semua. Akhirnya saya pilih yang paling banyak memberi

bingkisan ataupun uang, kalau pemilihan presiden kemarin tidak ada yang memberi bingkisan ataupun uang tapi saya memilih Bu Mega, saya memang senang dengan Bu Mega, orangnya kalem, keibuan", Ungkap Mak Yh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ani W. Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005
- Ani Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta: Jalasutra, 1998,
- Anis Hamim (ed). *Kalau Feminis Emangnya Kenapa?*, Yogyakarta : Rifka Anisa Women Crisis Center, 2002
- Adriana Venny, "Pesta Demokrasi : Berkah atau Mimpi Buruk" dalam *Jurnal Perempuan No. 34 Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004
- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1990
- Budhy Prianto dan A. Utaminingsih, "Potret Perempuan Pekerja Kebun Apel Kajian tentang 'Triple Role' dan 'Family Decision Making Role' Perempuan Pekerja Kebun Apel di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang" dalam *Jurnal Penelitian Volume XVII Nomor 2*, Universitas Merdeka Malang, 2005
- C. Y. Marselina Nope, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, Yogyakarta : Resist Book, 2005

- David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985
- David Berry. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2003
- David dan Julia Jary, *Collins, Dictionary of Sociology*, HarperCollinsPublishers, 1991
- David dan Julia Jary, *Collins, Dictionary of Sociology*, HarperCollinsPublishers, 1991
- Eicher, M. *Nonsexist research Methods: A Practical Guide*. London: Allen & Unwin Inc, 1991
- E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, ed. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*, Jakarta : Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2004.
- Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta :Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
- Harlon. *Perempuan Minang dalam Ranah Publik (Peran Bundo Kanduang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota)*, Tesis Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Yogyakarta : UGM, 2002.
- Henry A Berger, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali, 1981
- ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003

- Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Foundation, 2003
- Partini, "Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah", dalam *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 7 No. 3, Maret 2004
- Paul B Horton dan Chester L Hunt. *Sosiologi Jilid 1, Edisi Keenam* Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984
- Peter Worsley. *Pengantar Sosiologi, Sebuah Pembanding Jilid 2*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1992
- Paul B Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jilid 1, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984
- Paul B Horton dan Chester L Hunt. *Sosiologi Jilid 1, Edisi Keenam*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984
- Ratnawati, "Potret Kuota Perempuan di Parlemen", dalam *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 7 No. 3, Maret 2004
- Rachmad Hidayat, *Kapan Ilmu Akan Berubah?: Lebih Dekat Kepada Metodologi Feminis*, dalam Jurnal Perempuan No. 48, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006
- Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta : Jalasutra, 1998
- Saiful Arif, dkk, *Demokrasi: Sejarah, praktik dan dinamika Pemikiran*, Malang, Averrous Press, 2006

Saptari, R. dan Holzner, B. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Siti Musdah Mulia & Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama kerjasama LKAJ dan The Asia Foundation, 2005.

Simone De Beauvoir, *The Second Sex Kehidupan Perempuan*, diterjemahkan oleh Toni B. Febriantono, dkk, Pustaka Prometea, 2003

Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Sunyoto Usman. *Sosiologi ; Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta : CIREd, 2004

Water R. William, *Kehidupan Orang Jawa, Wanita dan Pria dalam Masyarakat Indonesia Modern*, (terj) Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995

Wendy K Kolmar and Frances Bartkowski. *Feminist Theory*, New York, USA : McGraw-Hill, 2005

Sumber Pendukung:

Jurnal Perempuan

Jurnal Studi Gender Palastren

www.indonesia.com.,

<http://mediaindonesia.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Feodalisme>.

TENTANG PENULIS



Siti Malaiha Dewi, S.Sos. M.Si. lahir di Kudus, pada 26 Juni 1977. Pendidikan dasar dan menengah ditempuhnya di Kudus. Pendidikan dasar di MI *Miftahut Tholibin* Mejobo (1983-1989) merangkap belajar di madrasah Diniyyah *Miftahut Tholibin* Mejobo. Pendidikan menengah di MTsN Kudus (1989-1992) dan SMA Islam Al Ma'ruf Kudus (1992-1995). Pendidikan kesarjanaanya diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara, Universitas Diponegoro, Semarang (1995-1999) dan mendapat gelar master dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi UGM Yogyakarta (2005-2007) dengan tesis berjudul "Perempuan di Panggung Politik (Studi Peran Politisi Perempuan di DPRD Kabupaten Kudus Pasca *Affirmative Action*)". Sejak Tahun 2000 mengajar mata kuliah *Civic Education* di STAIN Kudus.

Selain mengajar, juga aktif di beberapa organisasi perempuan seperti Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus, Fatayat NU, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan Kudus, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), MUI Kabupaten Kudus, dan pada tahun 2008 menjadi koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Kudus.

Selain berorganisasi, alumni PMII & IPPNU ini juga aktif melakukan berbagai penelitian, antara lain Ketua Tim Peneliti *Participatory Action Research* (PAR) berjudul "Pemberdayaan Pendidikan Islam MTs Safinatul Huda di Kepulauan Karimunjawa

Kabupaten Jepara Berbasis *Participatory Action Research* (PAR)" didanai oleh Ditjend Perguruan Tinggi Agama Islam (Ditperta) Departemen Agama RI, Tahun 2006; Anggota peneliti "Profil Perempuan Cacat dan Lansia Propinsi Jawa Tengah", kerjasama Forum PSG Jateng & Biro Pemberdayaan Perempuan Pemprov Jawa Tengah, Tahun 2007; Anggota peneliti "Analisis Gender terhadap Kebijakan Pemberantasan Buta Aksara Jawa Tengah", kerjasama Forum PSG Jateng dan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008; Ketua Tim "Pemberdayaan Perempuan Komunitas Miskin Kota di Perumahan Sosial Pecinan, Hadipolo, Jekulo, Kudus Melalui Pendidikan Berbasis Realitas", didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam (Diktis) Depag RI, Tahun 2008, dan Ketua Tim peneliti PAR dengan judul "Merebut Hak Atas Pendidikan Yang Membebaskan (Program Pemberdayaan Pendidikan Keluarga (*Asuhan Pondokan*) dalam Komunitas *Sedulur Sikep* di Kaliyoso Kabupaten Kudus)" didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam (Diktis) Depag RI, Tahun 2009; Anggota peneliti "Kajian Gender dan Lingkungan", kerjasama Forum PSG Jateng dan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2009; serta Peneliti Utama tentang "Politik Uang di Mata Perempuan", didanai oleh DIPA STAIN Kudus, Tahun 2009.

Beberapa tulisannya telah diterbitkan oleh beberapa jurnal, antara lain: "Perempuan di Tengah Pertarungan Politik Lokal: Refleksi Atas Peran Politik Politisi Perempuan Pasca *Affirmative Action*"; "Opini Publik terhadap Peran Politisi Perempuan di DPRD Kabupaten Kudus Periode 2004-2009", dan buku "Orientasi Politik Perempuan Marginal" ini adalah buku pertamanya. Untuk urusan akademik dapat dihubungi di email: dewimalaiha@yahoo.com.

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN MARGINAL



"Buku berjudul *Orientasi Politik Perempuan Marginal* cukup inspiratif. Buah karya Siti Malaiha Dewi, seorang perempuan aktivis, masih muda dan berbakat. Analisis tajam penulis membuka mata kita tentang banyak hal yang selama ini tak terpikirkan terkait isu perempuan dan politik. Berbeda dengan banyak buku lain yang membidik isu serupa, buku ini menyuguhkan pengalaman politik kaum perempuan marginal apa adanya di lapangan. Hasil wawancara dengan kelompok perempuan pinggiran: tukang parkir, pedagang kecil, buruh rokok, dalang, tukang batu bata, pengemis dan kaum papa lainnya memberikan nuansa tersendiri yang menjadikan buku ini enak dibaca dan mencerahkan. Kekuatan buku ini justru terletak pada kemampuan penulis mengungkapkan pergulatan politis kaum perempuan di dunia nyata, bukan hanya dalam wacana..."

Siti Musdah Mulia

Ahli Peneliti Utama dan Aktivis Perempuan
Indonesian Conference on Religion and Peace
(ICRP)



Siti Malaiha Dewi, S.Sos. M.Si. lahir di Kudus, pada 26 Juni 1977. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan Menengah di tanah kelahirannya, dia melanjutkan pendidikan kesarjanaanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara, Universitas Diponegoro, Semarang (1995-1999). Gelar masternya diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi, Sekolah Pascasarjana Uiversitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (2005-2007).

Selain sebagai dosen tetap STAIN Kudus, ia juga aktif di beberapa organisasi perempuan seperti Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus, Fatayat NU, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), MUI Kabupaten Kudus, dan pada tahun 2008 menjadi koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Kudus.

ISBN: 978-979-16440-3-7